LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP) TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI/ LATAR BELAKANG

Dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, sejak kemerdekaan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui penataan organisasi pengelola pembangunan masyarakat disertai dengan pengembangan berbagai konsep pembangunan masyarakat yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat di Indonesia.

Perkembangan organisasi pembangunan masyarakat desa yang secara khusus sebagai wadah yang diberikan kewajiban untuk mengelola kebijakan, program dan kegiatan pembangunan masyarakat desa sejak kemerdekaan Indonesia sampai saat ini.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa pada tingkat provinsi dibawah tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur. Pada tingkat kabupaten, karena penetapan kebijakan otonomi daerah, nomenklatur instansi pemberdayaan masyarakat diserahkan kepada daerah masing-masing. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk , maka pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk.

B. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKJIP) Dinas Permberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 , Disusun Atas Dasar:

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana telah diubah beberapa kali terakir dengan Undang Undang nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerntah penganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang.
3. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Negara Pendaya gunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk tehnik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020. Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenggah Kabupaten Nganjuk tahun 2025 – 2029.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 tahun 2025 Tentang Perubahan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 tahun 2022 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026.
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15Ttahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Perubahannya.
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 29 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025- 2029
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 30 tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
18. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk tahun 2025.

C. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Adapun rincian tugas dan fungsi organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK

I. TUGAS POKOK

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

II. FUNGSI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. pelaksanaan administrasi pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. TUGAS POKOK

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

IV. FUNGSI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. pelaksanaan administrasi pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
4. pembinaan aparatur;
5. pengelolaan urusan kepegawaian;
6. pembinaan dan koordinasi penyusunan dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
7. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan barang milik negara dan daerah;
8. pembinaan dan koordinasi urusan kepegawaian;
9. pengelolaan administrasi jabatan fungsional; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkaitan dengan tugasnya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

1. melaksanakan urusan persuratan;
2. melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
3. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
4. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara dan barang milik daerah;
5. melaksanakan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur

dan administrasi jabatan fungsional;
6. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa

Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang penataan desa dan kerja sama desa.

Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan penataan dan kerja sama desa;
2. pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penataan dan kerja sama desa;
3. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan dengan penataan dan kerja sama desa;
4. penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penataan dan kerja sama desa;
5. penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penataan dan kerja sama desa;
6. pelaksanaan administrasi bidang penataan dan kerja sama desa; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa.

Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
2. pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa;
3. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan pemberdayaan kemasyarakatan desa;
4. penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan kemasyarakatan desa;
5. penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan kemasyarakatan desa;
6. pelaksanaan administrasi bidang yang berkaitan dengan pemberdayaan kemasyarakatan desa; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkaitan dengan tugasnya.

d. Bidang Bina Pemerintahan Desa

Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang administrasi pemerintahan desa.

Bidang Bina Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa;
2. pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa;
3. penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa;
4. pelaksanaan administrasi bidang administrasi pemerintahan desa; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkaitan dengan tugasnya.

e. Bidang Keuangan, Aset dan Ekonomi Desa

Bidang Keuangan, Aset dan Ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan perumusan rancangan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten di bidang keuangan, aset dan ekonomi desa.

Bidang Keuangan, Aset dan Ekonomi Desa menyelenggarakan fungsi:

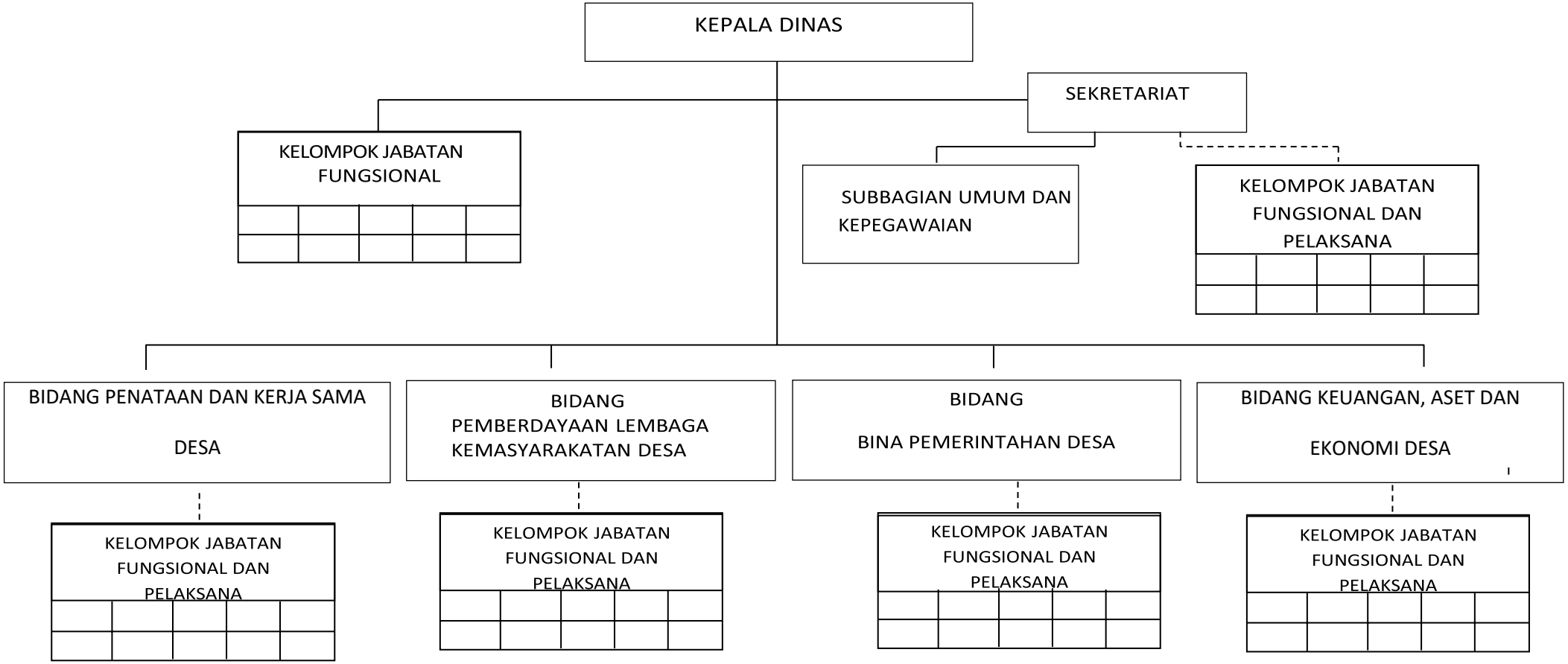
1. perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan, asetdan ekonomi desa;
2. pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan, aset danekonomi desa;
3. penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan, aset dan ekonomi desa;
4. pelaksanaan administrasi bidang keuangan, aset dan ekonomi desa; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkaitan dengan tugasnya.

II. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK



Jumlah pegawai di Lingkungan Dinas PMd Kabupaten Nganjuk

No	Jabatan	Pendidikan terakhir	Pangkat/Golongan	Jumlah	Ket
1	Kepala Dinas	S3	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	
2	Sekretaris Dinas	S2	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	
3	Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	S2	Pembina (IV/a)	1	
4	Kabid Keuangan dan Aset Dan Ekonomi Desa	S1	Penata TK I (III/d)	1	
5	Kabid Pemerintahan Desa Dan Kelurahan	S2	Pembina (IV/a)	1	
6	Kabid Penataan dan Kerjasama Desa	S2	Pembina (IV /a)	1	
7	Kasubag Umum	-	-	-	
8	Penggerak Swadaya Masyarakat	S2	Pembina (IVa)	1	
9	Perencana Ahli Muda	S1	Penata Tingkat I/IIIc	1	
10	Analis Keuangan Pusat dan Daerah	S1	Penata Tingkat I (III/d)	1	

11	Penggerak Swadaya Masyarakat	S1	Penata Tingkat I(III/d)	5	
11	Bendahara	S1	Penata Tingkat I (III/b)	1	
12	Analis Kemasyarakatan	S1	Penata Muda (III/a)	1	
13	Analis Desa dan Kelurahan	S1	Penata Muda (III/a)	1	
20	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	Penata Muda Tk. I (III/b)	1	
21	Pengadminitrasi Perkantoran	SARJANA	Penata Muda Tk I (III/b)	1	
22	Pengadminitrasi Perkatoran	SARJANA	Pengatur TK I (II/d))	7	
28	Arsiparis Trampil (P3K)	D3	Golongan 7	1	
29	Pranata Komputer Trampil (P3K)	D3	Golongan 7	1	
30	Analis Hukum Ahli Pertama	S1	Golongan 9	1	
28	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	Golongan 5	1	
29	Operator Layanan Operasional	SLTA	-	9	
	Total			39	

Sumber Data Kepegawaian Dinas PMD Tahun 2025

D. ISU – ISU STRATEGIS (STRATEGIC ISSUED) DPMD

Dalam upaya penentuan isu-isu strategis dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas PMD Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan urusan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk, perlu dikedepankan kerangka berpikir positif yang dapat menentukan isu-isu Strategis yang dijabarkan sebagai berikut :

- Peningkatan pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kapasitas Kelembagaan Desa
- Belum Semua Desa Melaksanakan Kegiatan Kegiatan yang berkaitan dengan Penataan Desa dan Melaksanakan Kerjasama Antar Desa.
- Belum optimalnya frekuensi Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa;
- Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan kurang baik dan tertib baik Kuantitas maupun Kualitasnya.
- Pelaksanaan Tata Kelola Keuangan dan Aset yang Kurang baik dan tertib Kualitassnya .
- Belum optimalnya Peran , Fungsi dan Kontribusi BUMDES Dalam Mendukung Pembangunan.

E.SISTEMATIKA PENULISAN.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahu 2025 Disusun Dengan Sistematika Sebagai Berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum /Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
D. Isu – Isu Strategis (Strategig Issued) yang Sedang dihadapi organisasi

E. Sistematika Penulisan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

A. Ikhtisar / Ringkasan Renstra/Renja

B. Perjanjian Kinerja Pada Tahun yang Bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional (Provinsi/ Kabupaten yang Berbatasan)

A.5 Analisis Keberhasilan / Kegagalan Capaian Kinerja

A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

A.7Analisis Program /Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan

B. Realisasi Anggaran

BAB IV : PENUTUP

Lampiran - Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. IKHTISAR/RINGKASAN RENCANA STRATEGIS/RENCANA KERJA

Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Nganjuk yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 adalah ”Nganjuk yang Maju, Adil dan Sejahtera”. Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan tahap ke IV RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 3 tahun. Tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

a. Nganjuk Tumbuh

Tujuan	:	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup
Indikator tujuan	:	1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah 2. Indeks Gini 3. Tingkat Kemiskinan Daerah 4. Tingkat Pengangguran Terbuka 5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Sasaran 1	:	Meningkatkan produktivitas ekonomi lokal
Indikator Sasaran	:	1. Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan 2. Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3. Nilai Investasi Daerah

Sasaran 2	:	Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan
Indikator sasaran	:	1. Nilai Tukar Petani 2. Skor Pola Pangan Harapan
Sasaran 3	:	Meningkatnya daya saing produk unggulan Daerah
Indikator sasaran	:	1. Rata-rata lama tinggal wisatawan 2. Pertumbuhan koperasi sehat 3. Rata-rata peningkatan volume usaha mikro
Sasaran 4	:	Mengurangi penduduk miskin melalui pemberdayaan masyarakat dan desa
Indikator sasaran	:	1. Angka kemiskinan ekstrim 2. Indeks desa membangun
Sasaran 5	:	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja
Indikator Sasaran	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Sasaran 6	:	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
Indikator Sasaran	:	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Sasaran 7	:	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan akses hunian layak, serta keselamatan transportasi
Indikator Sasaran	:	1. Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum 2. Rasio Kecelakaan Per 10.000 Kendaraan 3. Persentase rumah layak huni

b. Nganjuk Sehat dan Cerdas

Tujuan	:	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing
Indikator Tujuan	:	Indeks Pembangunan Manusia

Sasaran 1	:	Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat
Indikator Sasaran	:	Indeks Kesehatan
Sasaran 2	:	Meningkatkan kualitas pendidikan dan prestasi kepemudaan
Indikator Sasaran	:	1. Indeks Pendidikan 2. Jumlah pemuda berprestasi
Sasaran 3	:	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan Gender
Indikator Sasaran	:	Indeks Pembangunan Gender (IPG)

c. Nganjuk Akuntabel

Tujuan	:	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik
Indikator tujuan	:	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran 1	:	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel dan efektif, serta pelayanan publik yang prima
Indikator Sasaran	:	1. Nilai SAKIP 2. Opini BPK terhadap LKPD 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Indeks Pelayanan Publik
Sasaran 2	:	Meningkatkan transformasi digital pemerintahan daerah
Indikator Sasaran	:	Indeks SPBE
Sasaran 3	:	Meningkatkan profesionalitas ASN
Indikator Sasaran	:	Indeks Profesionalitas ASN

d. Nganjuk Harmonis

Tujuan	:	Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya
Indikator Tujuan	:	Indeks Kesalehan Sosial
Sasaran 1	:	Meningkatkan penanganan konflik sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum
Indikator Sasaran	:	1. Persentase penanganan konflik sosial

2. Persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat

Sasaran 2	:	Meningkatkan pelestarian warisan kebudayaan lokal
Indikator Sasaran	:	Persentase warisan seni budaya dan tradisi lokal yang dilestarikan
Sasaran 3	:	Meningkatkan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
Indikator Sasaran	:	Indeks Risiko Bencana

Dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah dimaksud, Dinas PMD memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan ke-1, yaitu **"Nganjuk Tumbuh"** dengan tujuan **"Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup".**
Rumusan pernyataan strategi Perangkat Daerah tahun 2024-2026, untuk tujuan dinas PMD Kab Nganjuk adalah ***"Meningkatkan Kemandirian Desa dan Keberdayaan Masyarakat Guna Mendukung penangganan Kemiskinan."***

Dengan Indikator Tujuan Indeks Desa Membangun (IDM) dengan sasaran Meningkatnya jumlah desa Mandiri.

Tahun 2025 sebagai irisan antara Renstra 2024-2026 dan Renstra 2025-2029 artinya tahun 2025 merupakan tahun transisi dan kesinambungan (jembatan) perencanaan, di mana kebijakan, program, dan anggaran tahun tersebut harus menyelaraskan target akhir Renstra lama dengan target awal Renstra baru. Maksud dari hal tersebut adalah :

a. Tahun 2025 menjadi titik perpindahan dari fokus pembangunan Renstra 2024-2026 menuju arah baru Renstra 2025-2029.

b. Program yang berjalan di tahun 2025 tidak boleh terputus, melainkan menyambungkan capaian tahun-tahun sebelumnya (2024) ke arah target jangka menengah yang baru (2029).
c. Tahun 2025 menjadi waktu untuk menyesuaikan program operasional dengan Dokumen RPJMN/Renstra 2025-2029 yang baru.
d. Tahun ini menjadi masa verifikasi target kinerja akhir Renstra 2024-2026 untuk dirumuskan ke dalam Renstra 2025-2029 yang lebih komprehensif.

Hal ini bertujuan agar pembangunan tetap berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan tanpa kehilangan arah strategis, terutama dalam penyesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Tahun 2025 adalah jembatan untuk memastikan kesinambungan pembangunan agar tetap selaras dengan arah kebijakan nasional terbaru (RPJPN 2025-2045) meski dokumen perencanaan lima tahunan yang baru sedang dalam tahap finalisasi.

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah Meningkatkan Kemandirian Desa dan Keberdayaan Masyarakat Guna Mendukung Penanggulangan Kemiskinan

sasaran yang akan dicapai adalah “Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri, dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025

Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
Meningkatkan Kemandirian Desa dan Keberdayaan Masyarakat Guna Mendukung Penanggulangan Kemiskinan	Indeks Desa Membangun	0,7869

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	32,9 %

Indikator Kinerja Utama Dinas PMD berdasarkan Renstra 2024-2026 sebagaimana pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PMD Tahun 2025

Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Formula/Penjelasan
1.	Meningkatya Jumlah Desa Mandiri	Indeks Desa Membangun (IDM)	$\frac{Jumlah\ Total\ IDM}{264\ (\ Desa\ )}$
		Persentase Desa Mandiri	$\frac{Jumlah\ Desa\ Mandiri}{Jumlah\ Seluruh\ Desa\ (264\ Desa\ )}\ X\ 100\ \%$

Tabel 2.3

Tujuan, Sasaran, Perangkat Daerah Tahun 2025

Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa (Indeks)	0,7810

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa (Indeks)	0,7810
	Persentase Desa Mandiri (%)	45,5 %

Indikator Kinerja Utama Dinas PMD berdasarkan Renstra 2025-2029 sebagaimana pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2025

Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Desa (Indeks)	Nilai Indeks	**Konsep :** 1. **Tujuan:** Mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa untuk mencapai sasaran Pembangunan Desa yang berkelanjutan. 2. **Prinsip Dasar:** Kemandirian desa dipandang sebagai hasil akumulasi dari pemenuhan layanan dasar, penguatan sosial-ekonomi, kelestarian lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang baik. **Status Desa:** Hasil perhitungan akan mengklasifikasikan desa ke dalam 5 status: Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri Untuk Kabupaten Nganjuk Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal sudah tidak ada. **Definisi Operasional :** Indeks Desa disusun berdasarkan **6 Dimensi Utama**. Yaitu 1. Layanan Dasar : Ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan (PAUD-SMA) dan

NO	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				kesehatan (Posyandu, Puskesmas, Tenaga Medis). 2. Sosial : Ketahanan sosial masyarakat termasuk modal sosial (gotong royong), keberagaman, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. 3. Ekonomi : Keragaman mata pencaharian, ketersediaan pasar/pertokoan, akses perbankan, dan produktivitas ekonomi lokal (BUMDes). 4. Lingkungan : Kualitas lingkungan hidup, potensi bencana, dan upaya mitigasi atau pelestarian alam di wilayah desa. 5. Aksesibilitas : Kemudahan akses transportasi, kondisi jalan, serta ketersediaan sarana komunikasi dan informasi (internet/sinyal). 6. Tata Kelola : Efektivitas pemerintahan desa, transparansi anggaran (APBDes), dan kualitas pelayanan administrasi kepada warga
				Formula Perhitungan : ID = Jumlah Skor / Jumlah Desa Se Kab Nganjuk = N Indeks Desa = N : 100
				Konsep : Meningkatnya Kemandirian Desa" diukur melalui indikator yang lebih integratif dan Fokus utamanya adalah transformasi status **Desa Mandiri**
				Definisi Operasional : Untuk mengukur "Meningkatnya Kemandirian Desa difokuskan pada peningkatan skor pada 6 Dimensi Indeks Desa: **1. Dimensi Layanan Dasar:** Ketersediaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan air minum yang berkualitas.

NO	TUJUAN/ SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN
				2. **Dimensi Sosial:** Kapasitas masyarakat dalam gotong royong, pemenuhan keadilan gender, dan kerukunan warga. 3. **Dimensi Ekonomi:** Kemandirian ekonomi melalui keberhasilan BUM Desa, pasar desa, dan keberagaman lapangan usaha. 4. **Dimensi Lingkungan:** Kemampuan desa dalam mitigasi bencana dan menjaga kelestarian ekologi. 5. **Dimensi Aksesibilitas:** Kelayakan infrastruktur jalan, transportasi, dan jangkauan internet/komunikasi. **Dimensi Tata Kelola:** Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan transparansi pengelolaan APBDes.
				Formulasi Perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah seluruh Desa}}$ X 100%

Tujuan Pelaksanaan Pembangunan yang akan dicapai Dinas PMD Kabupaten Nganjuk pada Renstra adalah “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa “ dengan Indikator Tujuan “ Indeks Desa “ .

Sasaran Strategis adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, specifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan,Adapun sasaran yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan pada renstra dinas PMD adalah, Meningkatnya

Kemandirian Desa . Dengan Indikator Sasaran “ Persentase Desa Mandiri “ (%).

B . PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya yang didukung dengan program/kegiatan/sub kegiatan yang didanai oleh APBD Tahun Anggaran 2025.

Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk yang dicapai pada tahun 2025 sebanyak 1 (Satu) sasaran dengan indikator kinerja dan dengan Perjanjian Kinerja selon II :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK

Berdasarkan Renstra Tahun 2024 - 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025
	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri (%)	32,9 %

No	Sasaran	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1	MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6.593.212.740	APBD
2	MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENATAAN DESA	Rp. 100.000.000	APBD
3	MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Rp. 168.454.000	APBD
4	MENYELENGGARAKAN PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp 3.557.196.550	APBD
5	MENYELENGGARAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp. 838.964.000	APBD
	Jumlah Total	**Rp. 11.257.827.290**	

Dikarenakan telah diterbitkan Renstra 2025-2029 maka dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja sebagai Berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK

Berdasarkan RENSTRA Tahun 2025 - 2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025
	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri (%)	45,5 %

No	Sasaran	Anggaran	Ket
1	2	3	4
1	MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 6.449.953.132	APBD
2	MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENATAAN DESA	Rp. 91.964.100	APBD
3	MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Rp. 124.114.950	APBD
4	MENYELENGGARAKAN PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp. 5.333.053.825	APBD
5	MENYELENGGARAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp. 770.140.450	APBD
	Jumlah Total	**Rp. 12.769.226.457**	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Insntansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan Progres Kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan.

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Proses pengukuran akuntabilitas kinerja didasarkan pada capaian pengukuran hasil Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati bersama. Pengukuran ini merupakan suatu hasil penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja utama dan kegiatan berupa masukan, keluaran, dan hasil. Pengukuran keberhasilan capaian sasaran strategis dan target organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan strategis, menggunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat ini utamanya dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk. Hasil yang hendak dicapai dari Pelaksanaan Program Program yang terdapat pada urusan wajib tergambar pada pencapaian sasaran Program.Sedangkan untuk mengukur Keberhasilan Pencapaian tersebut ditetapkan Indikator.

Tabel

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 91%	Tercapai
2	80% ≤ 90%	Tercapai dengan capaian
3	< 80%	Tidak Tercapai

A.1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini ;

Pengukuran Capaian Kinerja dari sasaran Strategis yang telah di tetapkan oleh Dinas PMD Kabupaten Nganjuk dilakukan dengan membandingkan antara target Kinerja dengan Realisasi Kinerja, Sebagaimana Tabel Berikut :

Tabel 3.1

Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	**Sasaran Strategis**		**Indikator Kinerja**	**Dokumen Perencanaan** **Renstra 2024-2026** **Renstra 2025-2029**	**Target 2025**	**Realisasi 2025**	**Capaian (%)**
1.	Tujuan	Meningkatkan Kemandirian Desa dan Keberdayaan Masyarakat Guna Mendukung Penanggulangan Kemiskinan.	Indeks Desa Membangun (IDM)	Renstra 2024-2026	*0,7869*	*0,78191*	*99,36 %*
2.	Sasaran	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Status Perkembangan Desa	Persentase Desa Mandiri	Renstra 2024-2026	32,9	*29,92*	90,94 %

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan Renstra 2024-2026 Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
3.	Tujuan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Desa (ID)	Renstra 2025-2029	0,7810	0,7928	101,5%
4	Sasaran	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri (%)	Renstra 2025-2029	45,5 %	50 %	109,9 %

Keterangan : *Sumber Data Dinas PMD Kabupaten Nganjuk

*Realisasi Kinerja berdasarkan Renstra 2024-2026

dihitung sampai Bulan September Tahun 2025

Tabel 3.1.1

Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	TARGET KINERJA TAHUN 2025	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kemandirian Desa dan Keberdayaan Masyarakat Guna Mendukung Penanggulanggan Kemiskinan	*Indeks Desa Membangun (IDM)*	Rentra 2024-2026	*0,7869*	*0,78191*	*99,36 %*
2	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Status Perkembangan Desa	1. Persentase Desa Mandiri		32,9	*29,92*	90,94 %
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat da*n* Desa	Indeks Desa (Indeks)	Rentra 2025-2029	0,7810	0,7928	101,5%

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	TARGET KINERJA TAHUN 2025	REALISASI KINERJA TAHUN 2025	CAPAIAN (%)
4	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri (%)		45,5 %	50 %	109,9 %

RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2024 - 2026

.

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Indeks Desa maka Pada Tahun 2025 Target Skor IDM ***0,7869*** untuk capaian realisasi kinerja berdasarkan Renstra 2024-2026 dihitung mulai september 2025. Sehingga Realisasi Kinerja 0,78191 sehingga capaian kinerja kurang dari 100 % (99,36 %) . skor IDM sudah tidak bisa di ketahui penilaian Desa Mandiri Berdasarkan Indeks Desa yang Indikator Penilainnya berbeda dengan IDM.

   Untuk Indeks Desa Mandiri (IDM) ada 3 Indikator Penilaian Yaitu :

   a. Indeks Ketahanan Sosial
   b. Indeks Ketahan Ekonomi
   c. Indeks Ketahanan Lingkungan

   Sedangkan Indeks Desa (ID) untuk Indikator Penilaiannya ada 5 yaitu:

   b. Layanan Dasar
   c. Sosial
   d. Dimensi Ekonomi
   e. Dimensi Lingkungan
   f. Aksesibilitas, dan
   g. Tata Kelola Pemerintahan

   Untuk sasaran strategis yaitu Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Status Perkembangan Desa dengan target 32,9 % dengan Indikator Kinerja Persentase Desa Mandiri dengan Realisasi kinerja 29,2 % sehingga capaian kinerjanya mencapai 90,94 % ,capaian tersebut sampai september 2025.

3. **RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025 - 2029**

.

Pada Renstra 2025 – 2029 Indikator tujuan yaitu Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Indikator Kinerja Indeks Desa (ID) Berdasarkan target Kinerja Indeks Desa sebesar 0,7810 dengan realisasi kinerja 0,7928 sehingga capaian Kinerjanya sebesar 101,5 %. Skor Indeks Desa ini menunjukkan bahwa Desa yang ada di Kabupaten Nganjuk mengalami kemajuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Ekonomi Masyarakat. Peningkatan skor ini merupakan bukti bahwa Dana Desa dan investasi Pembanguan Lainnya telah dikelola secara efektif. Anggaran tidak hanya habis untuk administrasi tetapi berubah menjadi aset nyata yang meningkatkan kualitas hidup warga.

Sasaran Strategis pada Renstra 2025-2029 Meningkatnya Kemandirian Desa Dengan Indikator Kinerja Persentase Desa mandiri dengan Target Kinerja 45,5 % dengan realisasi Kinerja tercapai 50 % sehingga Realisasi Kinerja Mencapai 109,9 %. Ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Nganjuk.

Lonjakan hingga 50% ini menunjukkan bahwa desa-desa di Kabupaten Nganjuk memiliki resiliensi (daya tahan) yang lebih tinggi dari asumsi awal. Desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan subjek yang aktif mengelola sumber dayanya sendiri.

Target Perjanjian Kinerja 32,9 % disusun berdasarkan proyeksi data lama. Namun, adanya pendampingan desa yang masif memastikan setiap potensi desa tercatat secara akurat dalam sistem Indeks Desa. Kehadiran pendamping desa yang membantu input data memastikan indikator yang dulunya tidak terlihat (seperti gotong royong atau kearifan lokal) kini terkuak dan menambah poin Indeks desa.

Intervensi Lintas Sektor: Sinergi antara Kementerian Desa, Kementrian Keuangan , dan Kementrian Dalam Negeri menciptakan ekosistem pendukung yang lebih kuat dari yang diperkirakan semula.

A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Yang Lalu

Tabel 3.1.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Dokumen	Target				Realisasi			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Kemandirian Desa dan Keberdayaan Masyarakat Guna Mendukung Penanggulanggan Kemiskinan .	1 Indeks Desa Membangun (IDM)	Renstra 2024-2026	0,7494	0,7695	0,7795	0,7869	0,7421	0,7591	0,78191	*0,78191*
Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Status Perkembangan Desa	2 .Persentase jumlah Desa Mandiri		7,95 %	9,84 %	11,74 %	32,9	8,71 %	14,39 %	29,92 %	29,92 %
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	Indeks Desa (Indeks)	Renstra 2025-2029		-	-	0,7810		-	-	0,7928

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Dokumen	Target				Realisasi			
			2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri (%)					45,5		-	-	50 %

Sumber Data :

a.Sasaran Dinas PMD Untuk Tahun 2025 Adalah Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri Dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan yang terletak di Renstra 2024-2026 . Dengan Target Kinerja Skor IDM sudah tidak digunakan dan untuk indikator kinerja sasaran yaitu persentase Desa Mandiri sebesar 32,9 % .dan tercapai realisasi kinerjanya 29,92 % .

Indikator Sasaran dengan indikator kinerja persentase Desa Jumlah Desa Mandiri untuk tahun 2024 adalah 29,9 % (79 Desa Mandiri) sedangkan realisasi tahun 2025 adalah 50 % (132 Desa Mandiri) hal ini mencerminkan tranformasi struktural Desa dalam mengoptimalkan Dimensi Indeks Desa secara Simultan.Pencapaian ini merupakan hasil dari penguatan layanan dasar dan aksessibilitas yang lebih menjangkau masyarakat pelosok , serta peningkatan modal sosial melalui partsipasi warga dalam pembangunan.

Sasaran strategis dalam Renstra tahun 2025 -2029 adalah Meningkatnya Kemandirian Desa dengan indikator Kinerja Utama dengan target indeks desa 0,7810 dengan realisasi Kinerja 0,7928. Hal ini menunjukkan keberhasilan Desa dalam mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan secara komprehensif. Capaian ini didukung oleh Penguatan Layanan Dasar melalui perbaikan Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan serta peningkatan aksesibilitas fisik maupun Digital yang mempercepat mobilisasi warga. Dari sisi sosial, Penguatan Kohesi dan partisipasi masyarakat yang bersinergi dengan pertumbuhan ekonomi Desa. Secara bersamaan ada komitmen terhadap pelestarian Lingkungan melalui mitigasi Bencana pengelolaan sampah serta transformasi tata Pemerintahan yang lebih trasnparan dan akuntabel, membuktikan bhwa Desa telah berhasil membangun ekosisten kemandirian yang stabil menuju status Desa mandiri.

Realisasi persentase Desa Mandiri pada tahun 2025 dari target 45,5 % tercapai 50% mencerminkan keberhasilan transformasi struktural desa dalam mengoptimalkan enam dimensi utama indeks desa secara simultan. Pencapaian ini merupakan hasil dari penguatan layanan dasar dan aksesibilitas yang kini lebih menjangkau masyarakat, serta peningkatan modal sosial melalui partisipasi

aktif warga dalam pembangunan. Secara ekonomi, desa-desa tersebut telah mencapai kemandirian melalui penguatan ekosistem ekonomi lokal dan BUMDes, yang didukung oleh tata kelola pemerintahan desa yang semakin transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Sinergi ini dibarengi dengan kesadaran terhadap dimensi lingkungan melalui pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, sehingga angka 50% ini menandakan bahwa separuh desa di wilayah Kabupaten Nganjuk kini telah memiliki ketahanan fungsional di mana integrasi antara infrastruktur fisik, pemberdayaan manusia, dan efisiensi birokrasi desa telah menciptakan ekosistem yang tangguh terhadap tantangan eksternal sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri.

a. A.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT PADA DOKUMEN RENSTRA

Target Kinerja RENSTRA (RPD 2024 -2026 dan RPJMD 2025-2029)

TABEL 3.1.3.1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dasar Dokumen	Target Renstra (Tahun)						
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kemandirian Desa dan Keberdayaan Masyarakat Guna Mendukung Penanggulangan Kemiskinan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Renstra 2024-2026	0,7869	0,7869	0,7969	-	-	-	-

2	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Status Perkembangan Desa	a.Persentase Desa Mandiri	Renstra 2024 -2026	11,74	13,63	15,53	-	-	-	
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indek Desa (Indeks)	RPJMD 2025 - 2029	-	0.7810	0,7812	0,7814	0,7816	0,7818	0,7820
	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri (%)	RPJMD 2025 - 2029	-	45,5%	47,3%	49,2%	51%	53%	54,9

NB: Dinas PMD dalam Melaksanakan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sudah Sesuai

TABEL 3.1.3.2

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA (TAHUN 2025)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 . -Renstra 2025-2029.	Target Akhir Renstra 2024-2026. Renstra 2025-2029	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan (%)
1	Meningkatnya Kemandirian Desa dan Keberdayaan Masyarakat Guna Mendukung Penanggulangan Kemiskinan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Renstra 2024 - 2026	0,7963	0,78191	99,36 %
2	Meningkatnya Jumlah Desa dan Status Perkembangan Desa	Persentase Desa Mandiri	Renstra 2024-2026	15,53 %	29,92 %	192,66 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 . -Renstra 2025-2029.	Target Akhir Renstra 2024-2026. Renstra 2025-2029	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan (%)
3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indek Desa (Indeks)	Renstra 2025-2029	0,7818	0,7920	101,38 %
	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri (%)	Renstra 2025-2029	54,9 %	50 %	91 %

Sumber Data : Renstra DPMD 2024-2026 dan Renstra 2025-2029

1. Berdasarkan Permendes No. 9 tahun 2024 untuk IDM tahun 2025 Menjadi Indeks Desa. Sehingga Indeks Desa Membangun Sudah tidak digunakan.

Pada Tahun 2025 .Sasaran Dinas PMD Untuk Tahun 2025 Adalah Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri Dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan yang terletak di Renstra tahun 2024-2026 Dengan Target Kinerja Dengan Skor IDM . 0,7869 ditahun 2025 berdasarkan Permendes No 9 tahun 2024 untuk penghitungan Desa Mandiri dinas PMD di ganti menggunakan Indeks Desa. Dan persentase Desa Mandiri dengan target sebesar 32,9 % tercapai 29,92 % target yang disusun pada Renstra sampai dengan bulan September sehingga belum tercapai . Namun, adanya pendampingan desa yang masif memastikan setiap potensi desa tercatat secara akurat dalam sistem IDM. Kehadiran pendamping desa yang membantu input data memastikan .

2. a. Sasaran Strategis Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pada tahun 2025 menunjukkan hal yang positip hal ini tercermin dari capaian indeks desa sebesar 0,7928 yang melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,7818 dengan persentase capaian kinerja mencapai 101, 5 % dinas PMD Berhasil mengakselerasi kemandirian desa melalui ekspetasi awal .Keberhasilan ini mengidikasikan efektifitas program pengutan kapasitas kelembagaan , peningkatan partisipasi warga , serta optimalisasi pemanfaatan dana Desa dalam mendorong Tranformasi status Desa.

   b. Upaya Dinas PMD dalam mendorong kemandirian desa membuahkan hasil yang memuaskan, Indikator persenatse Desa Mandiri berhasil Terealisasi 50 %, dimana angka ini lebih tinggi 3 % poin daritarget awal yang sebesar 53 %.Capaian yang menyentuh angka 94 % ini Menjadi Bukti nyata keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah dan desa dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.keberhasilan ini didorong oleh maksimalnya Penggunaan Dana Desa untuk sektor Produktif.

A.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN STANDARD NASIONAL DAN CAPAIAN PROPINSI DAN KABUPATEN LAIN

TABEL 3.1.4.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standard Nasional (Berdasarkan Renstra 2024 -2026)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standar Nasional	Standar Provinsi Jawa Timur	Realisasi	Posisi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kemandirian Desa Dan Keberdayaan Masyarakat Guna Mendukung Penanggulangan Kemiskinan	Indeks Desa Membangun	0,7034		0,78191	Diatas
				0,8014		Dibawah
2	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Status Perkembangan Desa	Persentase Desa Mandiri	8,32		29,94	Diatas
				36,25		dibawah

1. Pada tahun tahun 2024 Indeks Desa Membangun untuk Kab Nganjuk dengan Realisasi 0,78191 dari standar Nasional kab Nganjuk diatas rata rata tetapi kalau dengan Propinsi kita masih dibawah rata rata. Sedangkan untuk tahun 2025 ini kita tidak menggunakan IDM tetapi memakai Indeks Desa.

2. Untuk Realisasi Jumlah desa Mandiri tahun 2024 adalah 79 Desa dari 264 desa, sehingga capaian realisasi mendapatkan 11,74 % jika dibandingkan dengan capaian nasional yaitu 8,32% (6238 Desa mandiri) dari desa seluruh Indonesia 74,961 Desa Mandiri Kab Nganjuk lebih Tinggi . Namun bila dibandingkan dengan Propinsi Jawa Timur Yaitu, 36,26 % (2800 Desa Mandiri) dari jumlah desa se propinsi jawa Timur yaitu 7.724 Desa Kab Nganjuk masih Realisasi Target Propinsi.

Tabel 3.1.4.2

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional
Berdasarkan RPJMD 2025 – 2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Standard Nasional	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Posisi Kinerja (Diatas/Dibawah)
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Desa (Indeks)	*0,6945 **0,7975 *** 0,7830	0,7928	Diatas Dibawah Diatas
2	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri (%)	27,2 %		29,92 %

Sumber : Kepmendes No. 343 tahun 2025 tentang status kemajuan dan kemandirian tahun 2025.

Keterangan * Indeks Desa Nasional

** Indeks Desa Propinsi

*** Indeks Desa Kab Kediri.

Perbandingan antara Indeks Desa (ID) Kabupaten Nganjuk sebesar 0,7928 dengan rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar 0,7975 memberikan gambaran posisi strategis Nganjuk dalam peta pembangunan desa regional. Meskipun terdapat selisih tipis sebesar 0,0047 Capaian Indeks Desa Kabupaten Nganjuk sebesar 0,7928 menunjukkan performa yang luar biasa karena telah berada menuju ambang batas kategori Desa Mandiri (≥ 0,7963),. Keberhasilan ini merupakan hasil dari transformasi struktural yang komprehensif, di mana penguatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan serta peningkatan aksesibilitas wilayah telah berhasil memicu pertumbuhan ekonomi lokal dan penguatan modal sosial masyarakat. Dengan tata kelola pemerintahan desa yang semakin modern dan transparan, serta komitmen yang kuat terhadap kelestarian lingkungan, Kabupaten Nganjuk telah berhasil menciptakan ekosistem pembangunan yang tangguh. Meskipun terdapat selisih tipis dengan rata-rata provinsi, angka ini membuktikan bahwa Nganjuk telah berhasil mengonversi kebijakan daerah menjadi kemandirian fungsional di tingkat desa, memposisikan daerah ini sebagai salah satu penggerak utama dalam pencapaian target Desa Mandiri di Jawa Timur

Capaian Indeks Desa Kabupaten Nganjuk sebesar 0,7928 mencerminkan performa pembangunan yang jauh melampaui rata-rata nasional sebesar 0,6945, dengan margin keunggulan yang sangat signifikan sebesar 0,0983 poin. Perbedaan mencolok ini menunjukkan bahwa Nganjuk telah berhasil melampaui fase "Desa Berkembang" dan kini memantapkan posisinya sebagai kabupaten dengan dominasi Desa Maju yang menuju Mandiri. Keberhasilan ini didorong oleh efektivitas tata kelola pemerintahan desa dan penyediaan layanan dasar serta aksesibilitas yang jauh di atas standar rata-rata nasional, di mana faktor geografis dan kebijakan daerah yang progresif mampu mempercepat pertumbuhan dimensi sosial dan ekonomi. Secara analitis, sementara skala nasional masih bergulat dengan pemenuhan standar pelayanan minimal, Kabupaten Nganjuk telah berhasil membangun ekosistem desa yang tangguh

terhadap aspek lingkungan dan mandiri secara finansial, menjadikannya salah satu daerah percontohan (benchmark) bagi percepatan transformasi desa di tingkat nasional.

A.5 (Tabel 3.1.5 ANALISIS KEBERHASILAN /KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA
(Analisis Keberhasilan / kegagalan capaian kinerja)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Alternatif Solusi
1	Meningkatkan Kemandirian Desa dan Keberdayaan Masyarakat Guna Mendukung Penanggulangan Kemiskinan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Renstra 2024-2026	0,7869	0,78191	99,36 %	a.Optimalisasi Indeks Desa. b.Efektivitas Pemanfatan Dana Desa. c.Sinergi Pembinaan dan Pendampingan. d. Partisipasi Masyarakat dan Swadaya	a. Target yang terlalu rendah. Dikarenakan ada perubahan kebijakan/ Klasifikasi. b. Akurasi dan validasi data Indek Desa . c. Keberlanjutan Status Mandiri	- a. Rekalibrasi dan Updating Target. b.Perubahan Fokus dari Kuantitas ke kualitas. c. Skema Reward dan Motivasi. udit dan Validasi Data.

2	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Status Perkembangan Desa	Persentase Desa Mandiri	Renstra 2024-2026	32,9%	29,29 %	89,02 %	a.Optimalisasi Indeks Desa. b.Efektivitas Pemanfatan Dana Desa. c.Sinergi Pembinaan dan Pendampingan. d. Partisipasi Masyarakat dan Swadaya	a. Target yang terlalu rendah. Dikarenakan ada perubahan kebijakan/ Klasifikasi. b. Akurasi dan validasi data Indek Desa . c. Keberlanjutan Status Mandiri	a. Rekalibrasi dan Updating Target. b.Perubahan Fokus dari Kuantitas ke kualitas. c. Skema Reward dan Motivasi. d. Audit dan Validasi Data.
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa (Indeks)	Renstra 2025-2029	0,781	0,7928	101,5	a.Optimalisasi Intervensi program lintas sektoral. B.Peningkatan kapasitas aparatur dan	a. Ketimpangan antar dimensi. b. Digitalisasi dan literasi Data. c. Kemandirian Ekonomi Desa (	a.Graduasi StatusDesa.mendorong desa dari status maju menjadi mandiri sehingga dengan memperkuat PAD

							kelembagaan desa. c.Akselerasi transformasi digital desa. d.Partisipasi Masyarakat yang tinggi.	Pendapatan Asli Desa). d. Partisipasi Kelompok Marginal. e.Rendahnyan Hilirisasi Produk Unggulan Desa.	Desa melalui optimalisasi Bumdes. b.Penguatan Reflikasi Best Practice .Desa dengan Skor Indeks Tertinggi sebagai Pilot Project. c.Digitalisasi Berkelanjutan. etahanan Ekonomi.
2	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri (%)	Renstra 2025-2029	45,5 %	50 %	109,89 %	a.optimalisasi dana desa dan alokasi dana desa.	a. Regulasi Aturan,Perubahan aturan dari Pusat yang sering kali tidak sinkron dengan kebutuhan lokal.	a.Penguatan kapasitas SDM. b.Replikasi Model Desa Mandiri. c.peningkatan Koneksitas Ekonomi.

							bTranformasi Ekonomi desa melalui Bumdes. c.Efektifitas Pendampingan Desa . d.Digitalisasi Pelayanan Desa. e.Sinergi Lintas Sektor. a.optimalisasi dana desa dan alokasi dana desa	b.Ketergantungan Dana Tranfer dari Pusat. c.Pemeliharaan aset yang sudah dibangun (Sering Rusak dikarenakan tidak ada perawatan).	d.Pemutakhiran data IDM secara real time. e.Mitigasi Risiko penurunan Status.

- ✓ Interfensi Pembangunan Desa dilakukan terhadap Score Indeks Ketahanan yang paling rendah dibandingkan dengan yang lain sehingga bisa menaikan kekurangan pada indeks ketahanan tersebut Dengan Pemutakhiran data.
- ✓ Pada Tahun 2025 Desa Yang Mengalami Peningkatan Indeks Ketahanan Ekonomi(Terdiri dari Keragaman Produksi Masyarakat,Akses pusat perdagangan dan pasar,Akses Logistik, akses Perbangkan dan Kredit dan keterbukaan Wilayah), Indeks Ketahanan Sosial (yang terdiri dari bidang Pendidikan ,Kesehatan, Modal Usaha dan Permukiman), Dan Indeks Ketahanan Lingkungan(Terdiri dari Indeks Kwalitas Lingkungan,Bencana Alam dan Tanggap Bencana), Sehingga Mengakibatkan Skor Indeks Desa Membangun Juga Meningkat Dari Maju Menjadi Mandiri , Yaitu menjadi 132 Desa .
- ✓ Sasaran Dinas PMD Adalah Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Dengan Target Kinerja ID Dengan Target Indeks 0,781 Dan Mendapatkan Realisasi Kinerja 0,7928 Sehingga Persentase Indikator Capaian Kinerja 101,5 %.

  Sasaran Dinas PMD untuk Tahun 2025 adalah Meningkatnya Jumlah Desa Dengan Status Sanggat Berkembang pada Penetapan Perkembangan Desa di aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (PRODESKEL) Dengan Target sebanyak 18 % yang Berada pada Status Cepat Berkembang dan Mendapatkan Realisasi sebanyak 20 %.

- ✓ Adanya program peningkatan kapasitas SDM Dinas PMD dan desa baik dari Kementerian dan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur.
- ✓ Regulasi tentang desa semakin lengkap.
- ✓ Tersedianya dukungan anggaran APBD untuk urusan pemberdayaan Masyarakat.
- ✓ Potensi eksistensi Lembaga pemerintahan dan kemasyarakatan desa serta pemberdayaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang.

- ✓ Keterbukaan informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi yang pesat.

Analisis :

Target 32,9 % mungkin disusun berdasarkan proyeksi data lama. Namun, adanya pendampingan desa yang masif memastikan setiap potensi desa tercatat secara akurat dalam sistem Indeks Desa . Kehadiran pendamping desa yang membantu input data memastikan indikator yang dulunya tidak terlihat (seperti gotong royong atau kearifan lokal) kini terkuak dan menambah poin Indeks desa.

Intervensi Lintas Sektor: Sinergi antara Kementerian Desa, Kemenkeu, dan Kemendagri menciptakan ekosistem pendukung yang lebih kuat dari yang diperkirakan semula.

Lonjakan hingga 50% ini menunjukkan bahwa desa-desa di Kabupaten Nganjuk memiliki **resiliensi (daya tahan)** yang lebih tinggi dari asumsi awal. Desa tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan subjek yang aktif mengelola sumber dayanya sendiri.

Selain itu pemahaman akan pertanyaan di kuesioner mempengaruhi capaian hasil. Sebagai contoh sebagai berikut:

1. Dimensi ketahanan sosial

- **Pendidikan (Aksesibilitas):** Bukan hanya soal adanya bangunan sekolah, tapi jarak tempuh dan ketersediaan sarana transportasi ke sekolah. Desa yang berhasil memperbaiki jalan akses ke sekolah SMA/SMK akan mendapatkan poin penuh.
- **Kesehatan (Tenaga Medis & Stunting):** Keberhasilan desa dalam menurunkan angka *stunting* melalui Posyandu dan ketersediaan tenaga kesehatan (bidan desa yang menetap) adalah indikator vital. Desa yang memiliki akses ke fasilitas kesehatan kurang dari 30 menit nilainya akan penuh.

- **Modal Sosial:** Ini adalah indikator "khas Indonesia". Poin desa akan tinggi jika kegiatan gotong royong, keberadaan kelompok olahraga, dan organisasi kemasyarakatan aktif. Seringkali, desa sebenarnya sudah punya ini, namun baru tercatat dengan baik dalam sistem pendataan terbaru.

2. Dimensi Ketahanan Ekonomi (Pendorong Kemandirian)

Indikator ini yang membedakan Desa "Maju" dengan Desa "Mandiri".

- **Keragaman Produksi Masyarakat:** Desa tidak lagi hanya bergantung pada satu komoditas (misalnya hanya padi). Jika desa memiliki industri rumah tangga, kerajinan, atau pengolahan hasil tani, skornya akan tinggi.
- **Akses Lembaga Keuangan:** Keberadaan ATM, agen bank (seperti BRIlink), atau Koperasi/BUMDes yang berfungsi sebagai penyedia modal. Kemudahan warga meminjam modal usaha di dalam desa sangat menentukan status Mandiri.
- **Pusat Perdagangan:** Adanya pasar desa atau toko kelontong yang permanen. Jika warga tidak perlu keluar desa untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka ketahanan ekonomi dianggap sangat kuat.

3. Dimensi Ketahanan Ekologi/Lingkungan (Sering Terabaikan tapi Krusial)

Banyak desa naik statusnya karena mulai memperhatikan mitigasi bencana dan sanitasi.

- **Tanggap Bencana:** Desa yang memiliki sistem peringatan dini (meskipun sederhana) dan jalur evakuasi akan mendapat poin tambahan. Di era perubahan iklim, kesiapan desa menghadapi banjir atau longsor menjadi indikator penting.
- **Sanitasi dan Pembuangan Sampah:** Desa Mandiri wajib memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik (tidak dibakar atau dibuang ke sungai) dan akses air bersih yang mencapai 100% rumah tangga.

A.6 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER

TABEL 3.1.6

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatkan Kemandirian Desa dan Keberdayaan Masyarakat Guna Mendukung Penanggulangan Kemiskinan	Indeks Desa Membangun (IDM)	Renstra 2024-2026	100,79	67,20	103,66
2	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Status Perkembangan Desa	Persentase Desa Mandiri	Renstra 2024-2026	240,94		
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Desa (Indeks)	Renstra 2025-2029	101,5	93,48 %	12,22 %
2	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri %	Renstra 2025-2029	109,9		

Target Indikator Kinerja Dinas PMD Untuk Indeks Desa tahun 2025 dengan Indeks 0,7810 Capaian Kinerja 101,58 %. Sasaran Meningkatnya

Jumlah Desa Mandiri dan Status Perkembangan Desa diampu oleh 5 program yang ada di Dinas PMD dengan pagu anggaran Rp. 12.769.226457. Adapun Realisasi Penyerapan Anggarannya Sebesar Rp. 11.708.532.863, dengan jumlah rata-rata capaian kinerja 105,7 % dan Realisasi Anggaran sebesar 93,48 % Sehingga Tingkat Efisiensi Sebesar 12,22 %.

A.7 Analis Program / Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja.

TABEL 3.1.7
Analisis Program / Kegiatan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan ***-Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029***	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	7	8	9
1.	*Meningkatkan Kemandirian Desa dan Keberdayaan Masyarakat guna mendukung penanggulangan kemiskinan*	Indeks Desa Membangun (IDM)	Renstra 2024-2026	-		-	-	-
2	*Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan Status Perkembangan Desa*			*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*	*Nilai SAKIP DPMD (74,15)*			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan *-Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029*	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	7	8	9
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	14 Dokumen	10 Dokumen	71,42
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun Tepat Waktu	105 Dokumen	33 Dokumen	91,43 %
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kehadiran ASN	**0**	**0**	**0**
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia	3612	2697	74,67 %
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Yang Tersedia Untuk Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 Unit	4 Unit	100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan ***-Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029***	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	7	8	9
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyedian Jasa Penunjang Urusan Penunjang Urusa Pemerintah daerah	50 Laporan	20 Laporan	40 %
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Yang Menunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Layak Fungsi	69 Unit	58 Unit	73,91 %
				PROGRAM PENATAAN DESA	*Persentase Desa dengan penataan sesuai standart ketentuan*	24 %	11,4 %	47,5 %
				Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Penataan Desa	66 Desa	27 Desa	40,90 %
				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	*Persentase Desa dengan pelaksanaan kerjasama secara aktif*	87 %	24 %	9,19 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan ***-Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029***	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	7	8	9
				Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerjasama dan Pembangunan	230 Desa	45 Desa	9,19 %
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	*Persentase Desa Yang telah menyelenggarakan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa sesuai standart*	100 %	38 %	38 %
				Pembinaan dan Pengawasa Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa	100 %	38 %	38 %
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,	*Persentase Desa YangKapasitas Kelembagaannya diberdayakan*	45 %	0 %	0 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan ***-Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029***	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	7	8	9
				LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Kelembagaannya diberdayakan	118 %	41 Desa	34, 74 %
1	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Desa (Indeks)	RPJMD 2025-2029					

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan ***-Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029***	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	7	8	9
2	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri (%)		*PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*	*Nilai SAKIP DPMD*	75 %	74,15 %	98,86 %
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	14 Dokumen	14 Dokumen	100 %
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	a.Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (orang/bulan)	31 orang/bulan	31 Orang/ bulan	100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan ***-Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029***	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	7	8	9
					b.Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2 Laporan	2 Laporan	100 %
					c.Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	72 laporan	72 laporan	100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan *-Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029*	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	7	8	9
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	-		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	a.Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 paket	1 paket	100 %
					b.Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket	2 Paket	2 Paket	100 %
					c.Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	8 paket	8 paket	100 %
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	a.Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	40 Unit	40 Unit	100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan *-Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029*	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	7	8	9
					b.Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)			
					c.Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7 Unit	7 Unit	100 %
					d.Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	00
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a. jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	24 Laporan	24 Laporan	100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan *-Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029*	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	7	8	9
					b.jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2 Laporan	2 Laporan	100 %
					c.Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	a.Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	69 Unit	69 Unit	100 %
					b.Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7 Unit	7 Unit	100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan ***-Renstra 2024-2026*** ***-Renstra 2025-2029***	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	7	8	9
					c.Jumlah Mebel Yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	100 %
					d.Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40 Unit	40 Unit	100 %
				PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi penataan Desa (%)	25 %	25,76 %	103 %
				Penyelenggaraan Penataan Desa	a.Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	10 unit	22 Unit	220 %
					b.Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	30 Desa	19 Desa	63,33 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan *-Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029*	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	7	8	9
					c.Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	1 Desa	0	0
					d.jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	30 Desa	19 Desa	63,33 %
				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yg melaksanakan kerja sama yang produktif dan legal (%)	87 %	87 %	100 %
				Fasilitasi Kerja sama antar Desa	a.Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	230 Desa	230 Desa	100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan ***-Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029***	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	7	8	9
					b.Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	10 Dokumen	10 Dokumen	100 %
					c.Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	15 Dokumen	15 Dokumen	100 %
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik (%)	100 %	100 %	100 %
				Pembinaan dan Pengawasa Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	a.Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi .Pemerintahan Desa (Dokumen)	264 Desa	264 Desa	100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan ***-Renstra 2024-2026*** ***-Renstra 2025-2029***	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	7	8	9
					b.Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	1Laporan		
					c..Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	1 Laporan		
					d..Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan	1 Laporan		
					e..Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	264 Dokumen		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan *-Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029*	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	7	8	9
					f..Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan peningkatan kapasitas (0rang	100 Orang	100 Orang	100 %
					g. Jumlah Dokumen g.Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	528 Dokumen	528 Dokumen	100 %
					h. .Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen	264 Dokumen	264 Dokumen	100 %
					i.. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	264 Dokumen	264 Dokumen	100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan ***-Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029***	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	7	8	9
					j.Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	21 Dokumen	21 Dokumen	100 %
					k..Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	100 Orang	100 Orang	100 %
				Pembinaan dan Pengawasa Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	80 Dokumen	80 Dokumen	100 %
				Pembinaan dan Pengawasa Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	264 Dokumen	264 Dokumen	100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan ***-Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029***	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	7	8	9
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	*Persentase Desa YangKapasitas Kelembagaannya diberdayakan*	45 %	45 %	100 %
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum	a.Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat	300 Dokumen	300 Dokumen	100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan *-Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029*	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	7	8	9
				Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Hukum Adat (Dokumen)			
					b.Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	384 Lembaga	384 Lembaga	100 %
					c.Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan *-Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029*	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan 2025	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	7	8	9
					Pendapatan Asli Desa (Dokumen)			
					d.Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)	110 Dokumen	110 Dokumen	100 %
					e.Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 %

Indeks Desa diampu oleh 5 program Yaitu

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dengan Indikator Target kinerja Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab Nganjuk adalah 75 dan mendapatkan nilai SAKIP Dinas PMD 74,15 dengan predikat BB.
2. PROGRAM PENATAAN DESA dengan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Persentase Desa dengan penataan sesuai standart ketentuan. Capaian Program/Kegiatan mencapai 103 % dengan formula

$$\frac{Jumlah\ Desa\ yang\ difasilitasi\ Penataannya}{Jumlah\ Seluruh\ Desa}\ x\ 100\%$$

   dikarenakan ketepatan dan komitmen dari seluruh elemen masyarakat, aparat desa dan pemerintah daerah dalam menjalankan program penataan desa. Dukungan kebijakan dan regulasi peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis yang jelas memberikan landasan hukum dan arah pelaksanaan kegiatan.
3. PROGRAM PENINGKATAN DAN KERJASAMA DESA Dengan Indikator Kinerja Program/Kegiatan yaitu Persentase Desa Yang Melaksanakan kerjasama yang produktif dan legal .dengan target 87 %. Dengan formula

$$\frac{Jumlah\ Desa\ yang\ melaksanakan\ kerjasama\ yang\ produktif\ dan\ legal}{Jumlah\ Seluruh\ Desa}\ x\ 100\%$$

   Dimana Jumlah Desa yang melaksananakan kerjasama secara legal dan produktif sebanyak230 Desa (87 %) .Pencapaian kinerja desa dalam melaksanakan kerjasama secara legal dan produktif diwujudkan melalui penguatan tata kelola kolaboratif yang taat azasterhadap regulasi serta berorientasi pada kemanfaatan publik secara berkelanjutan.Dimensi legalitas dipastikan melalui pemenuhan instrumen hukum berupa naskah Perjanjian Kerjasama (NPK) atau peraturan bersama Kepala Desa (Permakades) yang selaras dengan kewenangan desa , sedangkan dimensi produktip dibuktikan dengan adanya nilai tambah berupa optimalisasi pemanfaatan aset , efisiensi Pelayanan , serta peningkatan pendapatan asli Desa (PADes).

4. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Dengan Indikator Program / Kegiatan Persentase Desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik Dengan Capaian Program /Kegiatan 100 % sudah tercapai dimana target 264 Desa, dengan target nilai rata – rata 86,83. Sudah Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa, Fasilitasi penyusunan RKP, Fasilitasi Penggelolaan Keuangan Desa, Pembinaan dan Pemberdayaan Bum Desa dan Lembaga Kerja Sama Desa, Fasilitasi Penyusunan Profil Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Pada tahap III ada 31 Desa Yang Tidak Melengkapi laporan realisasi anggaran dan laporan kinerja anggaran, sehingga Tidak Bisa mencairkan Anggaran secara Maksimal.
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Dengan Indikator Kinerja Persentase desa Yang Kapasitas Kelembagaanya diberdayakan mencapai 100%. Dengan Formula .

$$\frac{Jumlah\ Desa\ yang\ kapasitas\ Kelembagaanya\ diberdayakan}{Jumlah\ Seluruh\ Desa}\ x\ 100\%$$

Dikarenakan Tepat dalam Perencanaan Target program. Dimana Pada saat Penyusunan Renstra Target 45 % Capaiannya 118 Desa dan Sudah Terpenuhi. Dengan pendukung Permendes 23/2017 tentang Pengembangan dan Penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam dan Perpres 99/2017 dan Permendagri 36/2020 yang mengatur PKK, anggaran fasilitasi pembinaan dan APBD dan APBDesa, dukungan pengurus TP PKK Kabupaten yang aktif.

B.REALISASI ANGGARAN

TABEL 3.2
Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.449.953.132	5.654.251.598	795.701.534	87.66%
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.307.200	39.114.250	192.950	99.51%
a.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.880.000	30.119.680	760320	97,54 %
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.281.640.000	4.495.537.683	786102317	85,12 %
b.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.255.535.000	4.469.531.683	786.003.317	85.04%
b.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	5.691.000	5.593.000	98.000	98,28 %

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
	Keuangan Akhir Tahun SKPD				
b.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.414.000	20.413.000	1000	99,99%
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0			0
c.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	0	0	0
c.2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	0	0	0	0
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	333.020.800	331.293.120	1.727.680	99,48 %
d.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	19.998.900	19.982.930	15.970	99,92 %
d.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.275.400	54.686.932	588.468	98,94 %
d.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.152.500	1.972.000	180.500	91,61 %

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
d.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	-	100 %
d.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	236.938.000	236.835.799	102.201	99,96 %
d.6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.666.000	14.815.459	850.541	94,57%
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.415.058	80.662.950	1.752.108	97,87 %
e.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas /Kendaraan Dinas Jabatan				
e.2	Pengadaan Kendaraan Operasional / Lapangan				
e.3.	Pengadaan Mebel	-		-	-
e.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.415.058	80.662.950	1.752.108	97,87%
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.026.000	86.253.529	2.772.471	96,88%
f.1	Penyedian Jasa Surat Menyurat	27.026.000	26.853.453	172.547	99.36%

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
f.2	Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.000.000	59.400.076	2.599.924	95,81%
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624.544.074	621.390.066	3.154.008	99,49%
g.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	328.279.693	326.320.757	1.958.320.936	99,40%
g.2.	Pemeliharaan Mebel	*3.245.900*	3.243.000	2.900	99,91 %
g.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.230.000	38.228.703	1.297	100 %
g.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	254.111.627	252.948.559	1.163.068	99,54%
2,	PROGRAM PENATAAN DESA	91.964.100	91.008.000	956.100	98,96 %
a	Penyelenggaraan Penataan Desa	91.964.100	91.008.000	956.100	98,96%
a.1	Pembentukan Penghapusan	-			

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
	,Penggabungan dan Perubahan Status				
a.2	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	30.685.000	30.082.600	662.400	98,04%
a.3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	7.779.200	7.684.800	94.400	98,79%
a.4	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	-			
a.5	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat ,Kewenangan Kab/Kota	-			
a.6	Fasilitasi sarana dan Pra Sarana Desa	42.482.250	42.334.800	147.450	99,65%
3.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	124.114.950	122.671.867	1.443.083	26,59%
a	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	124.114.950	122.671.867	1.443.083	98,84 %
a.1	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	86.193.850	85.830.830	363.021	99,58%
a.2	Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	5.047.750	4.955.800	91.950	98,18%

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
a.3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	32.873.350	31.885.237	988.113	96,99 %
4.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	5.333.053.825	5.083.071.237	249.982.588	95,31%
a	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5.333.053.825	5.083.071.237	249.982.588	95,31%
a.1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan desa	8.201.900	8.201.900	0	100 %
a.2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	80.418.500	77.193.500	3.225.000	95,99 %
a.3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	25.273.500	23.773.500	1.500.000	94,06 %
a.4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4.911.941.775	4.670.029.187	241.912.588	95,08 %
a.5	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan desa	8.400.500	8.287.100	113.400	98,65 %

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
a.6	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	49.704.750	49.016.800	687.950	98,62 %
a.7	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa	167.358.500	166.152.850	1.205.650	99,28 %
a.8	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa	7.279.400	6.891.000	388.400	94,66 %
a.9	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	9.056.000	9.056.000	0	100 %
a.10	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	29.362.200	28.551.000	811.200	97,24 %
a.11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	6.078.800	5.990.400	88.400	98,55 %
a.12	Fasiltasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	7.618.000	7.568.000	50.000	99,34 %
a.13	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	22.360.000	22.360.000	0	100 %

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
5.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	770.140.450	757.530.161	12.610.289	98,36 %
a	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	770.140.450	757.530.161	12.610.289	98,36 %
a.1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW,	76.049.450	75.602.500	446.950	99,41 %

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
	PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				
a.2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	64.214.150	63.710.000	505.150	99,21 %
a.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	24.842.800	24.449.000	393.800	98,41%
a.4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	62.784.000	61.969.000	815.000	98,70 %
a.5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	29.102.700	28.429.000	673.700	97,69%

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
a.6	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	513.147.350	503.370.661	9.776.689	98,09 %
		Rata Rata Capaian Anggaran (%)			93,48 **%**

NB : Sasaran Strategis Dinas PMD Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri Dan Penberdayaan Kawasan Perdesaan yang dituangkan di Indikator Kinerja Utama Yaitu Indeks Desa dengan Target Skor 0,7810 dan tercapai dengan Realisasi Kinerja 0,7928 Dengan Pagu Anggaran Rp . 12.769.226.457 dengan Realisasi anggaran Rp. 11.708.502.853 Dengan Capaian anggaran Anggaran 91,69 % yang Diampu Dengan 5 (Lima) Program Yaitu :

1. Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dengan Indikator Kinerja Program Hasil Survey/ Kepuasan Masyarakat Dengan Pagu Anggaran Rp 6.449.953.132 ,- Dengan Realisasi Anggaran Rp. 5.654.251.598,- Sehingga Penyerapan Anggaran 98,86 %
2. PROGRAM PENATAAN DESA dengan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Persentase Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Penataan Desa Dengan Pagu Anggaran Rp.91.964.100,- Dan Realisasi Anggaran Rp. 91.008.000,- Dengan Capaian Anggaran sebesar 98,96 %
3. PROGRAM PENINGKATAN DAN KERJASAMA DESA Dengan Indikator Kinerja Program/Kegiatan yaitu Persentase Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerjasama dan Pembangunan Dengan Pagu Anggaran Rp.124.114.950,- dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.122.671.867,- sehingga Capaian Penyerapan Sebesar 98,84 %
4. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Dengan Indikator Program / Kegiatan Persentase Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola pemerintahan Desa Dengan Pagu Anggaran Rp. 5.333.053.825,- Dengan Realisasi Anggaran Sebesar Rp.5.083.071.237,-Sehingga Capaian Penyerapan Anggaran Sebesar 95,31 %.
5. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Dengan Indikator Kinerja Program /Kegiatan Persentase Desa Yang Kapasitas Kelembagaannya Di Berdayakan Dengan Pagu Anggaran Rp.770.140.450,- dengan Realisasi sebesar Rp, .757.530.161- Sehingga Penyerapan

Anggaran mencapai 98,36- %. Dengan Demikian Dinas PMD untuk Tahun 2025 Untuk Rata Rata Capaian Anggaran Sebesar 91,69 % Dengan Capaian Kinerja sebesar 128,14 %.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran yang berjalan. Pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. **Tujuan** Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu *"Meningkatya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa "* dengan Indikator Kinerja *"Indeks Desa "* (Target Kinerja Tahun 2025 sebesar 0,7810 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025 sebesar 0,7928 dengan Capaian **101,5%**). Adapun **Sasaran** Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa *yaitu "persentase Desa Mandiri "* (Target Kinerja Tahun 2025 sebesar 45,5 % dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025 sebesar 50 % dengan Capaian **109,9**)

Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang positif. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan desa yang berkelanjutan. Ketercapaian kegiatan pemberdayaan masyarakat secara khusus bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian masyarakat desa dalam pembangunan. Sementara itu, sasarannya meliputi peningkatan kualitas kelembagaan desa, penguatan peran masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan, serta peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi lokal.

Tercapainya berbagai program dan kegiatan mencerminkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, konsistensi dengan arah pembangunan

daerah, serta komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, ketercapaian kegiatan juga menjadi indikator atas penggunaan sumber daya yang efisien, transparan, dan akuntabel, serta menunjukkan kontribusi nyata perangkat daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, khususnya dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dan tantangan yang perlu menjadi perhatian ke depan, terutama dalam hal penguatan koordinasi antarprogram termasuk peningkatan sinergi antarsektor, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi keberlanjutan program pemberdayaan. Oleh karena itu, hasil evaluasi kinerja ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan rencana tindak lanjut dan perbaikan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan atas dukungan, kerja sama, dan partisipasinya. Semoga kerja keras yang telah dilakukan dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa dan menjadi pondasi kuat dalam mewujudkan pembangunan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

4.2. Saran

Dari Data Pelaksanaan Kerja serta Capaian Kinerja Dari Target , sasaran, Yang Telah Ditetapkan , Serta Memperhatikan Kesimpulan Dari Narasi yang disajikan dalam rangka Perbaikan Capaian Kinerja Dinas PMD Maka Kami Susun Beberapa Saran Sebagai Berikut :

- ✓ Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Untuk Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Di Kabupaten Nganjuk.
- ✓ Sinkronisasi Kinerja Internal Dinas PMD dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- ✓ Perlunya evaluasi pelaksanaan pemutakhiran dan Sinkronisasi data sehingga data yang didapatkan benar-benar sesuai dengan realita yang ada;
- ✓ Pemerintah Desa Agar Lebih Memprioritaskan Kegiatan Pemberdayaan yang Mendukung pengurangan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim.

Nganjuk, 5 Februari 2026

KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN NGANJUK

DR.SOPINGI,AP.MM
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19740302199311101

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	*Meningkatkan Kemandirian Desa dan Keberdayaan Masyarakat guna mendukung penanggulangan kemiskinan*	Indeks Desa Membangun	-				https://drive.google.com/drive/folders/1IwKQ0dMiPIRhoY_3AOD0yAGnLJxASTBq
2	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri dan	Persentase Desa Mandiri		13,3 %	50 %	366 %	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Status perkembangan Desa						
		Tingkat Status Desa					-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP		75	74,15		
a	Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di susun		14	10	71,42%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		105	33	31,43	
c	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-					
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.612 Dokumen	2.697 Dokumen	74,67%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pada yang di sediakan		4 Unit	4 Unit	100%	
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		50 Laporan	20 Laporan	40%	
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang di sediakan		69 Unit	58 Unit	84,06%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
2	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa Dengan Penataan Sesuai Stardar Ketentuan		24 persen	11,4 persen	47,5%	
a	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Penataan Desa		66 Desa	27 Desa	40,90%	
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa Dengan Pelaksanaan Kerja sama Secara Aktif		87 persen	24 persen	27,59	
a	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Kerja sama antar Desa dan Pembangunan		230 Desa	45 Desa	19,56%	
	PROGRAM ADMINISTRASI	Persentase Desa Yang telah Menyelenggarakan Administrasi		100 persen	0 persen	0%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
	PEMERINTAHAN DESA	Tata Kelola Pemerintahan Desa sesuai Standar					
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Tata Kelola Pemerintahan Desa		264 Desa	0 Desa	0%	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT	Persentase Desa Yang Kapasitas Kelembaannya diberdayakan		45 persen	0 persen	0%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
	DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan	Jumlah Desa Yang Kelembagaannya diberdayakan		118 Desa	41 Desa	34,74%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Desa (Indeks)		0,7810	0.7828	101,5	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri (%)		45,5	50	109,9	
a.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)		75	74,15	98,87	
a. 1	Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan		18	14	77,78%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)					
a. 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)		31 orang/bulan	31 orang/bulan	100%	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)		75	72	96%	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil		2	2	100%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)					
a. 3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)		-	-	0	
a. 4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)		1	1	100%	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		2	2	100%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)		8	8	100%	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		550	550	100%	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		12	12	100%	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		3.000	2.991	99,7%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
a. 5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		6 Unit	6 Unit	100%	
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		0	0	0	
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		0	0	0	
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		0	0	0	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
a. 6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		24	24	100%	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		2	2	100%	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		0	0	0	
a. 7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		20	20	100%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		2	2	100%	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		7	7	100%	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		40	40	100%	
b	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang mendapatkan Fasilitasi penataan Desa (%)		25	25.78	103.12 %	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
b. 1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)		10	22	220%	
		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)		25	27	108%	
		Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)		1	0	0	
		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)		30	19	63,33%	
c	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Desa yg melaksanakan kerja sama yang produktif dan legal (%)		87	87	100%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)		2	2	100%	
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)		15	15	100%	
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)		10	10	100%	
d	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik (%)	Renstra 2025-2029	100	100	100%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
e	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)		4	4	100%	
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)		1	1	100%	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)		2	2	100%	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan		1	1	100%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)					
		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)		264	264	100%	
		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)		100	100	100%	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)		528	528	100%	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)		264	264	100%	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)		20	20	100%	
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta		21	21	100%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
		Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)					
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)		100	100	100%	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)		80	80	100%	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)		264	264	100%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
e	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa yang Kapasitas kelembagaannya diberdayakan (%)		45	45	100%	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat		300	300	100%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
	Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)					
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan		384	384	100%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
		Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)					
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)		2	2	100%	
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan		110	110	100%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Dokumen Perencanaan -Renstra 2024-2026 -Renstra 2025-2029	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Link Bukti Dukung
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kesejahteraan Keluarga (Dokumen)					
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)		2	2	100%	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)		1	1	100%	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUGUH HARNOTO,SSTP,MM

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI HANDOKO TARUNA,S.STP,M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Nganjuk

Selaku atasan Pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Nganjuk,.....3. Januari 2025

Pihak kedua Pj. Bupati Nganjuk	Pihak Pertama Kepala Dinas PMD Kabupaten Nganjuk
SRI HANDOKO TARUNA,S.STP,M.Si	PUGUH HARNOTO, SSTP, MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	32,9 %

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1	MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 6.593.212.740	APBD
2	MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENATAAN DESA	Rp 100.000.000	APBD
3	MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Rp. 168.454.000	APBD
4	MENYELENGGARAKAN PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp. 3.557.196.550	APBD
5	MENYELENGGARAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp. 838.964.000	APBD
	Jumlah Total	Rp 11.257.827.290	APBD

Nganjuk, 3 Januari 2025

Pihak Kedua
PJ Bupati Nganjuk

SRI HANDOKO TARUNA,S.STP.MSI

Pihak Pertama
Kepala Dinas PMD
Kabupaten Nganjuk

PUGUH HARNOTO, SSTP.MM

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 53.200.000	APBD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.152.488.059	APBD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	APBD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 679.919.150	APBD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 107.962.707	APBD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 88.276.000	APBD
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 511.366.824	APBD
2	PROGRAM PENATAAN DESA	Penyelenggaraan Penataan Desa	Rp. 100.000.000	APBD
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Rp. 168.454.000	APBD
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp.3.557.196.550	APBD
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp.838.964.000	APBD

Nganjuk,..3.. Januari 2025

Pihak kedua
Pj.Bupati Nganjuk

SRI HANDOKO TARUNA,S.STP,M.Si

Pihak Pertama
Kepala Dinas PMD Kab Nganjuk

PUGUH HARNOTO,SSTP.MM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dr. SOPINGI, A.P, MM

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., SE, SH,. M.M,.M.BA.

Jabatan : Bupati Nganjuk

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang di perlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang di perlukan dalam rangka pemberian Penghargaan dan Sanksi.

Nganjuk, 22 September 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Bupati Nganjuk	Kepala Dinas PMD
	Kabupaten Nganjuk
Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., SE, SH,. M.M,.M.BA.	**Dr. SOPINGI, AP, M.M**

Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025
1	Sasaran : Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri (%)	45,5

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.449.953.132	APBD
2	PROGRAM PENATAAN DESA	91.964.100	APBD
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	124.114.950	APBD
4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	5.333.053.825	APBD
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	770.140.450	APBD
	Jumlah Total	12.769.226.457	

Nganjuk, 22 September 2025

Pihak Kedua

Bupati Nganjuk

Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, A.Md., SE, SH,. M.M,.M.BA.

Pihak Pertama

Kepala Dinas PMD

Kabupaten Nganjuk

Dr. SOPINGI, AP, M.M

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Raya Kedondong No. 03 Nganjuk Jawa Timur 64461
Telp (0358) 321162 Faks (0358) 321162
pmd.nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 100.3.3.2/ 93 /K/411.307/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025 S/D 2029

BUPATI NGANJUK

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instasi Pemerintah ditegaskan bahwa setiap Instansi Pemerintah Wajib Menetapkan Indikator Kinerja Utamadi lingkungan masing-masing. Untuk itu, maka perlu menyusun Keputusan Bupati Nganjuk tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah_telah digantikan oleh Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan aatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD dan Rencana Kerja SKPD;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Nganjuk Nomor 3 T ahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 – 2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 S/D 2029

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk, dengan rincian

Dipindai dengan CamScanner

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N g a n j u k
Pada tanggal : 12 Agustus 2025

a.n BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN NGANJUK

ttd

Dr. SOPINGI, AP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001

Disalin sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DINAS PMD
KABUPATEN NGANJUK

DEDIH SUTARDI, AP. MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19740529 199403 1 004

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/ 93 /K/411.307/2025
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 – 2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	TUJUAN/SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SUBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Desa	Nilai Indeks	**Konsep :** 1. **Tujuan:** Mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa untuk mencapai sasaran Pembangunan Desa yang berkelanjutan. 2. **Prinsip Dasar:** Kemandirian desa dipandang sebagai hasil akumulasi dari pemenuhan layanan dasar, penguatan sosial-ekonomi, kelestarian lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang baik. 3. **Status Desa:** Hasil perhitungan akan mengklasifikasikan desa ke dalam 5 status: Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri Untuk Kabupaten Nganjuk Desa Sangat Tertinggal dan Tertinggal sudah tidak ada.	Permendes No 9 Tahun 2024	Dinas PMD

				Definisi Operasional : Indeks Desa disusun berdasarkan **6 Dimensi Utama**. Yaitu 1. Layanan Dasar : Ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan (PAUD-SMA) dan kesehatan (Posyandu, Puskesmas, Tenaga Medis). 2. Sosial : Ketahanan sosial masyarakat termasuk modal sosial (gotong royong), keberagaman, dan perlindungan terhadap kelompok rentan. 3. Ekonomi : Keragaman mata pencaharian, ketersediaan pasar/pertokoan, akses perbankan, dan produktivitas ekonomi lokal (BUMDes). 4. Lingkungan : Kualitas lingkungan hidup, potensi bencana, dan upaya mitigasi atau pelestarian alam di wilayah desa. 5. Aksesibilitas : Kemudahan akses transportasi, kondisi jalan, serta ketersediaan sarana komunikasi dan informasi (internet/sinyal). 6. Tata Kelola : Efektivitas pemerintahan desa, transparansi anggaran (APBDes), dan kualitas pelayanan administrasi kepada warga.		
				Formula Perhitungan : ID = $\sqrt{D1+D2+D3+D4+D5+D6}$		

2.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri (%)	Persentase	**Konsep :** Meningkatnya Kemandirian Desa" diukur melalui indikator yang lebih integratif dan Fokus utamanya adalah transformasi status **Desa Mandiri**	Permendes No 9 Tahun 2024	Dinas PMD
				Definisi Operasional : Untuk mengukur "Meningkatnya Kemandirian Desa difokuskan pada peningkatan skor pada 6 Dimensi Indeks Desa: **1. Dimensi Layanan Dasar:** Ketersediaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan air minum yang berkualitas. **2. Dimensi Sosial:** Kapasitas masyarakat dalam gotong royong, pemenuhan keadilan gender, dan kerukunan warga. **3. Dimensi Ekonomi:** Kemandirian ekonomi melalui keberhasilan BUM Desa, pasar desa, dan keberagaman lapangan usaha. **4. Dimensi Lingkungan:** Kemampuan desa dalam mitigasi bencana dan menjaga kelestarian ekologi. **5. Dimensi Aksesibilitas:** Kelayakan infrastruktur jalan, transportasi, dan jangkauan internet/komunikasi.		

				6. Dimensi Tata Kelola: Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan transparansi pengelolaan APBDes.		
				Formulasi Perhitungan : Jumlah Desa Mandiri / Jumlah seluruh Desa X 100%		

Ditetapkan di : N g a n j u k

Pada tanggal : 12 Agustus 2025

a.n BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN NGANJUK

ttd

Dr. SOPINGI, AP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001

Disalin Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIS DINAS PMD
KABUPATEN NGANJUK

DEDIH SUTARDI, AP. MM
Pembina Tk. I
NIP. 19740529 199403 1 004

Lampiran : 1

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
LAPORAN IKHTISAR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib
Unit Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Belanja			Hasil/Kegiatan				Ket
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator Kegiatan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**12.769.226.457,00**	**11.708.540.863,00**	**1.060.685.594,00**		**12.769.226.457,00**	**11.708.540.863,00**	Rp.	
2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.307.200,00	39.114.250,00	192.950,00					
2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relisasi Kinerja SKPD	39.307.200,00	39.114.250,00	192.950,00	Masukan : Sumber Dana	39.307.200,00	39.114.250,00	Rp.	
					Keluaran : Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14	14	Laporan	
					Hasil : Terpenuhinya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	14	14	Laporan	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.281.640.000,00	4.495.537.683,00	786.102.317,00					
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.255.535.000,00	4.469.531.683,00	786.003.317,00	Masukan : Sumber Dana	5.255.535.000,00	4.469.531.683,00	Rp.	

Lampiran : 1

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Belanja			Hasil/Kegiatan				Ket
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator Kegiatan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Keluaran : Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	31	Orang/ Bulan	
					Hasil : Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	31	31	Orang/ Bulan	
2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.691.000,00	5.593.000,00	98.000,00	Masukan : Sumber Dana	5.691.000,00	5.593.000,00	Rp.	
					Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	Laporan	
					Hasil : Terpenuhinya Laporan Keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	2	Laporan	
2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.414.000,00	20.413.000,00	1.000,00	Masukan : Sumber Dana	20.414.000,00	20.413.000,00	Rp.	
					Keluaran : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	72	72	Laporan	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Belanja			Hasil/Kegiatan				Ket
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator Kegiatan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Hasil : Terpenuhinya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	72	72	Laporan	
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	333.020.800,00	331.293.120,00	1.727.680,00					
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.998.900,00	19.982.930,00	15.970,00	Masukan : Sumber Dana	19.998.900,00	19.982.930,00	Rp.	
					Keluaran : Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang di sediakan	1	1	Paket	
					Hasil : Terpenuhinya Komponen instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor yang di sediakan	1	1	Paket	
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.275.400,00	54.686.932,00	588.468,00	Masukan : Sumber Dana	55.275.400,00	54.686.932,00	Rp.	
					Keluaran : Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang di sediakan	8	8	Paket	
					Hasil : Terpenuhinya Bahan logistik Kantor yang di sediakan	8	8	Paket	
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.152.500,00	1.972.000,00	180.500,00	Masukan : Sumber Dana	2.152.500,00	1.972.000,00	Rp.	
					Keluaran : Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	2	2	Paket	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Belanja			Hasil/Kegiatan				Ket
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator Kegiatan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Hasil : Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	2	2	Paket	
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	Masukan : Sumber Dana	3.000.000,00	3.000.000,00	Rp.	
					Keluaran : Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	12	12	Dokumen	
					Hasil : Terpenuhinya Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	12	12	Dokumen	
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	236.928.000,00	236.835.799,00	92.201,00	Masukan : Sumber Dana	236.928.000,00	236.835.799,00	Rp.	
					Keluaran : Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	550	550	Laporan	
					Hasil : Terpenuhinya laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	550	550	Laporan	
2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.666.000,00	14.815.459,00	850.541,00	Masukan : Sumber Dana	15.666.000,00	14.815.459,00	Rp.	
					Keluaran : Jumlah Dokumen penata usahaan arsip dinamis pada SKPD	3.000	2.991	Dokumen	
					Hasil : Terpenuhinya Dokumen penata usahaan arsip dinamis pada SKPD	3.000	2.991	Dokumen	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Belanja			Hasil/Kegiatan				Ket
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator Kegiatan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.415.058,00	80.662.950,00	1.752.108,00					
2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	82.415.058,00	80.662.950,00	1.752.108,00	Masukan : Sumber Dana	82.415.058,00	80.662.950,00	Rp.	
					Keluaran : Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang di sediakan	6	6	unit	
					Hasil : Terpenuhinya Peralatan dan mesin Lainnya yang di sediakan	6	6	unit	
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.026.000,00	86.253.529,00	2.772.471,00					
2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.026.000,00	26.853.453,00	172.547,00	Masukan : Sumber Dana	27.026.000,00	26.853.453,00	Rp.	
					Keluaran : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	2	2	Laporan	
					Hasil : Terpenuhinya Laporan Penyediaan Jasa surat menyurat	2	2	Laporan	
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik	62.000.000,00	59.400.076,00	2.599.924,00	Masukan : Sumber Dana	62.000.000,00	59.400.076,00	Rp.	
					Keluaran : Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24	24	Laporan	
					Hasil : Terpenuhinya Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	24	24	Laporan	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624.544.074,00	621.398.066,00	3.146.008,00					

Lampiran : 1

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Belanja			Hasil/Kegiatan				Ket
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator Kegiatan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan, Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	328.279.693,00	326.328.757,00	1.950.936,00	Masukan : Sumber Dana	328.279.693,00	326.328.757,00	Rp.	
					Keluaran : Jumlah Kendaraan perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara yang di bayarkan pajaknya	7	7	unit	
					Hasil : Terpenuhinya Kendaraan perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan yang di pelihara yang di bayarkan pajaknya	7	7	unit	
2.13.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	3.302.754,00	3.270.750,00	32.004,00	Masukan : Sumber Dana	3.302.754,00	3.270.750,00	Rp.	
					Keluaran : Jumlah Mebel yang di pelihara	20	20	unit	
					Hasil : Terpenuhinya Mebel yang di pelihara	20	20	unit	
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.850.000,00	38.850.000,00	-	Masukan : Sumber Dana	38.850.000	38.850.000	Rp.	
					Keluaran : Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40	40	unit	
					Hasil : Terpenuhinya Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40	40	unit	
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	254.111.627,00	252.948.559,00	1.163.068,00	Masukan : Sumber Dana	254.111.627,00	252.948.559,00	Rp.	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Belanja			Hasil/Kegiatan				Ket
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator Kegiatan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Keluaran : Jumlah gedung kantor dan bangunan gedung kantor lainnya yang di pelihara/ rehabilitasi	2	2	unit	
					Hasil : Terpenuhinya gedung kantor dan banguan gedung kantor lainnya yang di pelihara/ rehabilitasi	2	2	unit	
02.13.02	**Program Penataan Desa**	**91.964.100,00**	**91.008.000,00**	**956.100,00**					
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	91.964.100,00	91.008.000,00	956.100,00					
2.13.02.2.01.0001	Pembentukkan Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	11.017.650,00	10.905.800,00	111.850,00	Masukan : Sumber Dana	11.017.650,00	10.905.800,00	Rp.	
					Keluaran : Jumlah Desa yang melakukan Pembentukan Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	1	0	desa	
					Hasil : Terpenuhinya Desa yang melakukan Pembentukan Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	1	0	desa	
2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	30.685.000,00	30.082.600,00	602.400,00	Masukan : Sumber Dana	30.685.000,00	30.082.600,00	Rp.	
					Keluaran : Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Wilayahnya	30	19	desa	
					Hasil : Terpenuhinya Desa yang terfasilitasi Penataan Wilayahnya	30	19	desa	
2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	7.779.200,00	7.684.800,00	94.400,00	Masukan : Sumber Dana	7.779.200,00	7.684.800,00	Rp.	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Belanja			Hasil/Kegiatan				Ket
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator Kegiatan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Keluaran : Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangannya	25	27	desa	
					Hasil : Terpenuhinya Desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangannya	25	27	desa	
2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	42.482.250,00	42.334.800,00	147.450,00	Masukan : Sumber Dana	42.482.250,00	42.334.800,00	Rp.	
					Keluaran : Jumlah sarana dan Pra Sarana Desa	10	22	Unit	
					Hasil : Terpenuhinya sarana dan Pra Sarana Desa	10	22	Unit	
02.13.03	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**124.114.950,00**	**122.671.867,00**	**1.443.083,00**					
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	124.114.950,00	122.671.867,00	1.443.083,00					
2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	86.193.850,00	85.830.830,00	363.020,00	Masukan : Sumber Dana	86.193.850,00	85.830.830,00	Rp.	
					Keluaran : Jumlah Dokumen Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/ kota	10	10	Dokumen	
					Hasil : Terpenuhinya Dokumen Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/ kota	10	10	Dokumen	
2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5.047.750,00	4.955.800,00	91.950,00	Masukan : Sumber Dana	5.047.750,00	4.955.800,00	Rp.	
					Keluaran : Jumlah Kerja sama antar Desa dengan pihak Ketiga dalam kabupaten/ kota	15	15	Dokumen	
					Hasil : Terpenuhinya Kerja sama antar Desa dengan pihak Ketiga dalam kabupaten/ kota	15	15	Dokumen	
2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	32.873.350,00	31.885.237,00	988.113,00	Masukan : Jumlah Dana	32.873.350,00	31.885.237,00	Rp.	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Belanja			Hasil/Kegiatan				Ket
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator Kegiatan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Keluaran : Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan	2	2	Dokumen	
					Hasil : Terpenuhinya Dokumen hasil fasilitasi pembangunan Kawasan Perdesaan	2	2	Dokumen	
2.13.04	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	**5.333.053.825,00**	**5.083.071.237,00**	**249.982.588,00**					
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5.333.053.825,00	5.083.071.237,00	249.982.588,00					
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggara Administrasi Pemerintahan Desa	8.201.900,00	8.201.900,00	-	Masukan : Sumber Dana	8.201.900,00	8.201.900,00	Rp.	
					Keluaran : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4	4	Dokumen	
					Hasil : Terpenuhinya Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4	4	Dokumen	
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	80.418.500,00	77.193.500,00	3.225.000,00	Masukan : Sumber Dana	80.418.500,00	77.193.500,00	Rp.	
					Keluaran : Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Produk Hukum Desa.	528	528	Dokumen	
					Hasil : Terpenuhinya Dokumen Penyusunan Produk Hukum Desa.	528	528	Dokumen	
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	25.273.500,00	23.773.500,00	1.500.000,00	Masukan : Sumber Dana	25.273.500,00	23.773.500,00	Rp.	

Lampiran : 1

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Belanja			Hasil/Kegiatan				Ket
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator Kegiatan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Keluaran : Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.	264	528	Dokumen	
					Hasil : Terpenuhinya Dokumen Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa.	264	528	Dokumen	
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4.911.941.775,00	4.670.029.187,00	241.912.588,00	Masukan : Sumber Dana	4.911.941.775,00	4.670.029.187,00	Rp.	
					Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	264	264	Dokumen	
					Hasil : Terpenuhinya Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	264	264	Dokumen	
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	8.400.500,00	8.287.100,00	113.400,00	Masukan : Sumber Dana	8.400.500,00	8.287.100,00		
					Keluaran : Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100	100	Orang	
					Hasil : Terpenuhinya Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	100	100	Orang	
2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	49.704.750,00	49.016.800,00	687.950,00	Masukan : Sumber Dana	49.704.750,00	49.016.800,00		

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Belanja			Hasil/Kegiatan				Ket
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator Kegiatan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan lembaga Kerja Sama antar Desa	80	80	Dokumen	
					Hasil : Terpenuhinya Dokumen Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan lembaga Kerja Sama antar Desa	80	80	Dokumen	
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	167.358.500,00	166.152.850,00	1.205.650,00	Masukan : Sumber Dana	167.358.500,00	166.152.850,00	Rp.	
					Keluaran : Jumlah Laporan hasil Penyelengggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1	1	Laporan	
					Hasil : Terpenuhinya Laporan hasil Penyelengggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1	1	Laporan	
2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	7.279.400,00	6.891.000,00	388.400,00	Masukan : Sumber Dana	7.279.400,00	6.891.000,00		
					Keluaran : Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	1	Laporan	
					Hasil : Terpenuhinya Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1	1	Laporan	

Lampiran : 1

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Belanja			Hasil/Kegiatan				Ket
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator Kegiatan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	9.056.000,00	9.056.000,00	-	Masukan : Sumber Dana	9.056.000,00	9.056.000,00	Rp.	
					Keluaran : Jumlah Dokumen Profil Desa	264	264	Dokumen	
					Hasil : Terpenuhinya Dokumen Profil Desa	264	264	Dokumen	
2.13.04.2.01.0013	Fasiitasi Pengelolaan Aset Desa	29.362.200,00	28.551.000,00	811.200,00	Masukan : Sumber Dana	29.362.200,00	28.551.000,00	Rp.	
					Keluaran : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	264	142	Dokumen	
					Hasil : Terpenuhinya Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	264	142	Dokumen	
2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	6.078.800,00	5.990.400,00	88.400,00	Masukan : Sumber Dana	6.078.800,00	5.990.400,00	Rp.	
					Keluaran : Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Kapasitas	100	100	Orang	
					Hasil : Terpenuhinya anggota BPD yang mengikuti pembinaan kapasitas	100	100	Orang	
2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	7.618.000,00	7.568.000,00	50.000,00	Masukan : Sumber Dana	7.618.000,00	7.568.000,00	Rp.	
					Keluaran : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	2	2	Laporan	
					Hasil : Terpenuhinya Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	2	2	Laporan	
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	22.360.000,00	22.360.000,00	-	Masukan : Sumber Dana	22.360.000,00	22.360.000,00	Rp.	

Lampiran : 1

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Belanja			Hasil/Kegiatan				Ket
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator Kegiatan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Keluaran : Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan Desa serta lomba Desa	21	21	Dokumen	
					Hasil : Terpenuhinya dokumen hasil evaluasi perkembangan Desa serta lomba Desa	21	21	Dokumen	
2.13.05	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**	**770.140.450,00**	**757.530.161,00**	**12.610.289,00**					
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	770.140.450,00	757.530.161,00	12.610.289,00					
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	76.049.450,00	75.602.500,00	446.950,00	Masukan : Sumber Dana	76.049.450,00	75.602.500,00	Rp.	

Lampiran : 1

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Belanja			Hasil/Kegiatan				Ket
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator Kegiatan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Keluaran : Jumlah Dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan, Lembaga kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa dan masyarakat Hukum adat	300	300	Dokumen	
					Hasil : Terpenuhinya Dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan, Lembaga kemasyarakatan Desa (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa dan masyarakat Hukum adat	300	300	Dokumen	
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	64.214.150,00	63.710.000,00	504.150,00	Masukan : Sumber Dana	64.214.150,00	63.710.000,00	Rp.	

Lampiran : 1

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Belanja			Hasil/Kegiatan				Ket
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator Kegiatan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Keluaran : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa dan Masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	384	384	Lembaga	
					Hasil : Terpenuhinya Lembaga Kemasyarakatan Desa (RT, RW, Posyandu, LPM dan Karangtaruna), Lembaga Adat Desa dan Masyarakat hukum adat yang ditingkatkan kapasitasnya	384	384	Lembaga	
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	24.842.800,00	24.449.000,00	393.800,00	Masukan : Sumber Dana	24.842.800,00	24.449.000,00	Rp.	
					Keluaran : Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekomoni Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatana Asli Desa	2	2	Dokumen	

Lampiran : 1

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Belanja			Hasil/Kegiatan				Ket
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator Kegiatan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Hasil : Terpenuhinya dokumen hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	2	2	Dokumen	
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	62.784.000,00	61.969.000,00	815.000,00	Masukan : Sumber Dana	62.784.000,00	61.969.000,00	Rp.	
					Keluaran : Jumlah Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan teknologi Tepat Guna	2	2	Laporan	
					Hasil : Terpenuhinya Laporan hasil fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan teknologi Tepat Guna	2	2	Laporan	
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	29.102.700,00	28.429.000,00	673.700,00	Masukan : Sumber Dana	29.102.700,00	28.429.000,00	Rp.	
					Keluaran : Laporan hasil fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	1	1	Laporan	
					Hasil : Terpenuhinya Laporan fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	1	1	Laporan	

Lampiran : 1

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Belanja			Hasil/Kegiatan				Ket
		Anggaran	Realisasi	Sisa	Indikator Kegiatan	Rencana	Realisasi	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	513.147.350,00	503.370.661,00	9.776.689,00	Masukan : Sumber Dana	513.147.350,00	503.370.661,00	Rp.	
					Keluaran : Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteran Keluarga PKK	110	110	Dokumen	
					Hasil : Terpenuhinya Dokumen hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteran Keluarga PKK	110	110	Dokumen	

Nganjuk, 31 Desember 2025
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN NGANJUK

Dr. SOPINGI, A.P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001

I. STATUS / DESA MANDIRI SE KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 – 2025

No	Kecamatan	Nama Desa	Status INDEKS DESA	
			Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5
1	**NGANJUK**	1. KEDUNGDOWO	MANDIRI	MANDIRI
		2. BALONGPACUL	MAJU	MAJU
2	**BAGOR**	1. BALONGREJO	MAJU	MAJU
		2. GIRIREJO	MAJU	MAJU
		3. PESUDUKUH	MAJU	MAJU
		4. SEKARPUTIH	MANDIRI	MANDIRI
		5. BUDURAN	MAJU	MAJU
		6. NGUMPUL	MAJU	MAJU
		7. BAGOR KULON	MAJU	MANDIRI
		8. PETAK	MANDIRI	MANDIRI
		9. PARON	MANDIRI	MANDIRI
		10. KARANG TENGAH	MANDIRI	MANDIRI
		11. SELOREJO	MAJU	MANDIRI
		12. GANDU	MAJU	MANDIRI
		13. KEREPKIDUL	MANDIRI	MANDIRI
		14. KUTOREJO	MANDIRI	MANDIRI
		15. SUGIHWARAS	MAJU	MAJU
		16. GEMENGGENG	MAJU	MANDIRI
		17. KENDALREJO	MAJU	MANDIRI
		18. BANARAN KULON	MAJU	MAJU
		19. BANARAN WETAN	MAJU	MAJU
3	**BARON**	1. SAMBIROTO	MANDIRI	MANDIRI
		2. GEBANGKEREP	MAJU	MAJU
		3. BARON	MANDIRI	MANDIRI
		4. WAUNG	MANDIRI	MANDIRI
		5. KEMLOKOLEGI	MANDIRI	MANDIRI

		6. KEMADUH	MANDIRI	MANDIRI
		7. GARU	MAJU	MAJU
		8. JEKEK	MANDIRI	MANDIRI
		9. KATERBAN	MAJU	MAJU
		10. MABUNG	MANDIRI	MANDIRI
		11. JAMBI	MANDIRI	MANDIRI
4	**BERBEK**	1. SALAMROJO	MAJU	MAJU
		2. CEPOKO	MAJU	MAJU
		3. MAGUAN	MAJU	MAJU
		4. SEMARE	BERKEMBANG	MAJU
		5. BERBEK	MAJU	MANDIRI
		6. MLILIR	BERKEMBANG	MAJU
		7. BENDUNGREJO	BERKEMBANG	MAJU
		8. SENGKUT	MANDIRI	MANDIRI
		9. NGRAWAN	MAJU	MAJU
		10. SUMBERWINDU	MAJU	MANDIRI
		11. KACANGAN	MAJU	MAJU
		12. SENDANGBUMEN	MAJU	MANDIRI
		13. PATRANREJO	MAJU	MAJU
		14. SUMBERURIP	BERKEMBANG	MAJU
		15. BULU	MAJU	MAJU
		16. GROJOGAN	MAJU	MAJU
		17. TIRIPAN	MAJU	MANDIRI
		18. BALONGREJO	MAJU	MAJU
		19. SONOPATIK	MAJU	MAJU
5	**GONDANG**	1. SUMBERJO	MAJU	MAJU
		2. NGLINGGO	MAJU	MAJU
		3. MOJOSETO	MAJU	MAJU
		4. KARANGSEMI	MAJU	MAJU
		5. SENJAYAN	MAJU	MAJU
		6. KEDUNGGLUGU	MAJU	MAJU

		7. JA`AN	MAJU	MAJU
		8. SUMBERAGUNG	MAJU	MAJU
		9. KETAWANG	MAJU	MAJU
		10. NGUNJUNG	MAJU	MAJU
		11. SANGGRAHAN	BERKEMBANG	MAJU
		12. BALONGGEBANG	MANDIRI	MANDIRI
		13. PANDEAN	MAJU	MAJU
		14. CAMPUR	MAJU	MAJU
		15. GONDANGKULON	MANDIRI	MANDIRI
		16. SENGGOWAR	MAJU	MAJU
		17. LOSARI	MAJU	MAJU
6	**JATIKALEN**	1. PERNING	MAJU	MAJU
		2. NGASEM	MAJU	MAJU
		3. GONDANG WETAN	MAJU	MAJU
		4. JATIKALEN	MAJU	MAJU
		5. BEGENDENG	MAJU	MAJU
		6. LUMPANGKUWIK	MAJU	MAJU
		7. DAWUHAN	MAJU	MAJU
		8. MUNUNG	MANDIRI	MANDIRI
		9. PULOWETAN	MAJU	MAJU
		10. PULE	MAJU	MAJU
		11. DLURUREJO	MAJU	MAJU
7	**KERTOSONO**	1. DRENGES	MAJU	MAJU
		2. JUWONO	MAJU	MAJU
		3. BANGSRI	MAJU	MAJU
		4. KALIANYAR	MAJU	MAJU
		5. TANJUNG	MANDIRI	MANDIRI
		6. NGLAWAK	MAJU	MAJU
		7. KEPUH	MANDIRI	MANDIRI
		8. TEMBARAK	MANDIRI	MANDIRI
		9. PELEM	MANDIRI	MANDIRI

		10. KUTOREJO	MANDIRI	MANDIRI
		11. LAMBANGKUNING	MAJU	MAJU
		12. PANDANTOYO	MAJU	MAJU
		13. KUDU	MANDIRI	MANDIRI
8	**LENGKONG**	1. BANJARDOWO	MAJU	MANDIRI
		2. LENGKONG	MANDIRI	MANDIRI
		3. JEGREG	MAJU	MANDIRI
		4. KEDUNGMLATEN	MANDIRI	MANDIRI
		5. PRAYUNGAN	MANDIRI	MAJU
		6. SUMBERSONO	MAJU	MANDIRI
		7. BALONGASEM	MAJU	MAJU
		8. SAWAHAN	MANDIRI	MANDIRI
		9. NGRINGIN	MAJU	MANDIRI
		10. JATIPUNGGUR	MANDIRI	MANDIRI
		11. KETANDAN	MAJU	MAJU
		12. SUMBERKEPUH	MAJU	MAJU
		13. NGEPUNG	MAJU	MAJU
		14. PINGGIR	MAJU	MAJU
		15. BANGLE	BERKEMBANG	MAJU
		16. SUMBERMIRI	MAJU	MAJU
9	**LOCERET**	1. TANJUNGREJO	MAJU	MAJU
		2. SOMBRON	MAJU	MAJU
		3. GENJENG	MAJU	MAJU
		4. KARANGSONO	MANDIRI	MANDIRI
		5. NGEPEH	MAJU	MANDIRI
		6. GODEAN	MANDIRI	MANDIRI
		7. PATIHAN	MAJU	MAJU
		8. MUNGKUNG	MANDIRI	MANDIRI
		9. SEKARAN	MAJU	MAJU
		10. LOCERET	MANDIRI	MANDIRI

		11. JATIREJO	MAJU	MANDIRI
		12. TEMPEL WETAN	MANDIRI	MANDIRI
		13. TEKENGLAGAHAN	MAJU	MANDIRI
		14. GEJAGAN	MAJU	MANDIRI
		15. CANDIREJO	MANDIRI	MANDIRI
		16. SUKOREJO	MAJU	MANDIRI
		17. KWAGEAN	MANDIRI	MANDIRI
		18. KENEP	MAJU	MANDIRI
		19. PUTUKREJO	MANDIRI	MANDIRI
		20. NGLABAN	MAJU	MAJU
		21. MACANAN	MAJU	MAJU
		22. BAJULAN	MAJU	MAJU
10	**NGETOS**	1. KUNCIR	MANDIRI	MANDIRI
		2. KEPEL	MAJU	MANDIRI
		3. SURU	MAJU	MAJU
		4. NGETOS	MAJU	MAJU
		5. KLODAN	MAJU	MAJU
		6. MOJODUWUR	MAJU	MANDIRI
		7. KWEDEN	MAJU	MANDIRI
		8. BLONGKO	MAJU	MANDIRI
		9. ORO-ORO OMBO	BERKEMBANG	BERKEMBANG
11	**NGLUYU**	1. SUGIHWARAS	MAJU	MAJU
		2. NGLUYU	MANDIRI	MANDIRI
		3. TEMPURAN	MAJU	MANDIRI
		4. LENGKONG LOR	MAJU	MAJU
		5. GAMPENG	MANDIRI	MANDIRI
		6. BAJANG	MAJU	MAJU
12	**NGRONGGOT**	1. CENGKOK	MANDIRI	MANDIRI
		2. TANJUNGKALANG	MANDIRI	MANDIRI
		3. JUWET	MAJU	MANDIRI

		4. KELUTAN	MAJU	MAJU
		5. NGRONGGOT	MANDIRI	MANDIRI
		6. MOJOKENDIL	MAJU	MAJU
		7. BETET	MANDIRI	MANDIRI
		8. KALORAN	MAJU	MAJU
		9. BANJARSARI	MAJU	MAJU
		10. DADAPAN	BERKEMBANG	MAJU
		11. TRAYANG	MAJU	MAJU
		12. KALIANYAR	MAJU	MANDIRI
		13. KLURAHAN	MANDIRI	MANDIRI
13	**PACE**	1. JAMPES	MAJU	MANDIRI
		2. MLANDANGAN	MAJU	MAJU
		3. GONDANG	MAJU	MANDIRI
		4. JATIGREGES	MAJU	MAJU
		5. JOHO	MAJU	MANDIRI
		6. SANAN	MAJU	MAJU
		7. PACEKULON	MANDIRI	MANDIRI
		8. CERME	MAJU	MANDIRI
		9. BABADAN	MAJU	MANDIRI
		10. BATEMBAT	MAJU	MAJU
		11. BANARAN	MANDIRI	MANDIRI
		12. BODOR	MAJU	MAJU
		13. PACE WETAN	MAJU	MANDIRI
		14. JETIS	MAJU	MANDIRI
		15. GEMENGGENG	MAJU	MAJU
		16. KECUBUNG	MAJU	MANDIRI
		17. PLOSOHARJO	MAJU	MANDIRI
		18. KEPANJEN	MAJU	MANDIRI
14	**PATIANROWO**	1. BUKUR	MAJU	MAJU
		2. BABADAN	MAJU	MAJU
		3. NGEPUNG	MAJU	MAJU

		4. PISANG	MANDIRI	MANDIRI
		5. LESTARI	MANDIRI	MANDIRI
		6. PECUK	MAJU	MANDIRI
		7. PATIANROWO	MANDIRI	MANDIRI
		8. PAKUNCEN	MANDIRI	MANDIRI
		9. ROWOMARTO	MAJU	MANDIRI
		10. NGROMBOT	MAJU	MANDIRI
		11. TIRTOBINANGUN	MAJU	MAJU
15	**PRAMBON**	1. GONDANGLEGI	MANDIRI	MANDIRI
		2. SINGKALANYAR	MAJU	MANDIRI
		3. MOJOAGUNG	MAJU	MAJU
		4. BANDUNG	MANDIRI	MANDIRI
		5. NGLAWAK	MAJU	MAJU
		6. BALETURI	MANDIRI	MANDIRI
		7. TEGARON	MAJU	MAJU
		8. TANJUNGTANI	MANDIRI	MANDIRI
		9. SANGGRAHAN	MAJU	MAJU
		10. ROWOHARJO	MAJU	MAJU
		11. SUGIHWARAS	MANDIRI	MANDIRI
		12. WATUDANDANG	MANDIRI	MANDIRI
		13. SONO AGENG	MANDIRI	MANDIRI
		14. KURUNGREJO	MANDIRI	MANDIRI
16	**REJOSO**	1. GEMPOL	MAJU	MANDIRI
		2. MUNGKUNG	MAJU	MAJU
		3. SETREN	MAJU	MAJU
		4. SUKOREJO	MAJU	MAJU
		5. SIDOKARE	MANDIRI	MANDIRI
		6. MOJOREMBUN	MANDIRI	MANDIRI
		7. NGADIBOYO	MAJU	MAJU
		8. REJOSO	MANDIRI	MANDIRI
		9. KLAGEN	MAJU	MAJU

		10. JATIREJO	MAJU	MAJU
		11. MLORAH	MANDIRI	MANDIRI
		12. PUHKEREP	MAJU	MAJU
		13. TALUN	MANDIRI	MANDIRI
		14. NGANGKATAN	MAJU	MANDIRI
		15. TALANG	MANDIRI	MANDIRI
		16. BANJAREJO	MAJU	MANDIRI
		17. SAMBIKEREP	MAJU	MAJU
		18. MUSIR LOR	MAJU	MAJU
		19. MUSIR KIDUL	MAJU	MANDIRI
		20. WENGKAL	MAJU	MAJU
		21. JINTEL	MAJU	MANDIRI
		22. KEDUNGPADANG	MAJU	MAJU
		23. TRITIK	BERKEMBANG	BERKEMBANG
		24. BENDOASRI	BERKEMBANG	BERKEMBANG
17	**SAWAHAN**	1. BENDOLO	MAJU	MAJU
		2. SAWAHAN	MANDIRI	MAJU
		3. NGLIMAN	MANDIRI	MANDIRI
		4. BARENG	MANDIRI	MANDIRI
		5. SIDOREJO	MAJU	MAJU
		6. DUREN	MANDIRI	MANDIRI
		7. SIWALAN	MAJU	MAJU
		8. MARGOPATUT	MANDIRI	MANDIRI
		9. KEBONAGUNG	MAJU	MAJU
18	**SUKOMORO**	1. SUMENGKO	MAJU	MAJU
		2. BLITARAN	MAJU	MAJU
		3. KEDUNGSOKO	MAJU	MANDIRI
		4. NGLUDO	MAJU	MAJU
		5. BUNGUR	MAJU	MAJU

		6. PEHSERUT	MAJU	MAJU
		7. NGRAMI	MAJU	MAJU
		8. BAGOR WETAN	MAJU	MANDIRI
		9. PUTREN	MAJU	MAJU
		10. NGRENGKET	MANDIRI	MANDIRI
19	**TANJUNGANOM**	1. KEDUNGOMBO	MAJU	MAJU
		2. SUMBERKEPUH	MAJU	MANDIRI
		3. WATES	MAJU	MAJU
		4. MALANGSARI	MAJU	MANDIRI
		5. GETAS	MAJU	MAJU
		6. SONOBEKEL	MAJU	MANDIRI
		7. NGADIREJO	MAJU	MANDIRI
		8. BANJARANYAR	MAJU	MAJU
		9. SIDOHARJO	MAJU	MANDIRI
		10. KAMPUNGBARU	MANDIRI	MANDIRI
		11. JOGOMERTO	MAJU	MANDIRI
		12. KEDUNGREJO	MAJU	MANDIRI
		13. SAMBIREJO	MAJU	MANDIRI
		14. DEMANGAN	MAJU	MANDIRI
20	**WILANGAN**	1. SUDIMOROHARJO	MAJU	MANDIRI
		2. WILANGAN	MANDIRI	MANDIRI

		3. NGADIPIRO	MANDIRI		MANDIRI	
		4. MANCON	MANDIRI		MANDIRI	
		5. NGUDIKAN	MANDIRI		MANDIRI	
		6. SOKOHARJO	MANDIRI		MANDIRI	
Jumlah Total				**264**		**264**

DAFTAR JUMLAH DESA MANDIRI

SEKABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 DAN 2025

No	Nama Kecamatan	Tahun 2024	Tahun 2025
1	*2*	*3*	*4*
1	SUKOMORO	**1**	**3**
2	SAWAHAN	**5**	**4**
3	TANJUNGANOM	**1**	**10**
4	PACE	**2**	**11**
5	PRAMBON	**8**	**9**
6	BARON	**8**	**8**
7	PATIANROWO	**4**	**7**
8	NGLUYU	**2**	**3**
9	NGANJUK	**1**	**1**
10	BAGOR	**7**	**11**
11	WILANGAN	**5**	**6**
12	BERBEK	**1**	**5**
13	NGETOS	**1**	**5**
14	LOCERET	**8**	**14**
15	KERTOSONO	**6**	**6**
16	NGRONGGOT	**5**	**7**
17	JATIKALEN	**1**	**1**
18	GONDANG	**2**	**2**
19	REJOSO	**7**	**11**

20	LENGKONG	**4**	**8**
	Jumlah Total	**79**	**132**

Kepala Dinas PMD
Kabupaten Nganjuk

DR.SOPINGI,AP.MM
Pembina Utama Muda /1V/c)
Nip. 197403021993111001